



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TAPIN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah di rubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 12 tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
3. Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor. 03 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
7. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

2. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial syarat kerja dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2018, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah :

1. Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ialah Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja.

2. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
4. Pembinaan, pengawasan pengendalian UPT;
5. Pengelolaan kesekretariatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

1. Kepala

Memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas:

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan Dinas Tenaga Kerja.
2. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja dan RPJMD, serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
3. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja sesuai prosedur untuk kelancaran tugas;
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
5. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai dibandingkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disepakati sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
7. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijaksanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Ketenagakerjaan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran perumusan kebijaksanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Tenaga Kerja;
8. Mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja ;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja

dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja

10. Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja
 11. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
 12. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan Dinas sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan pencapaian sasaran program kesekretariatan Dinas ;
 13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai dibandingkan dengan Rencana Program masing-masing Bidang, untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahannya;
 14. Membuat Laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 15. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati Tapin sesuai dengan bidang tugas.
2. Sekretariat
- Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja . Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai tugas :
1. Merumuskan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis Badan dan program kerja Sekretariat tahun lalu untuk penetapan atasan dan menjadi bahan penyusunan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 2. Merumuskan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin bersama dengan Unsur-unsur Organisasi Dinas lainnya sesuai RPJMD untuk

- penetapan atasan;
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
 6. Mengkoordinasikan Bidang-Bidang dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk sinkronisasi serta kelancaran penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 7. Membina dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas ;
 8. Membina dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan anggaran, serta kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Dinas ;
 9. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan asset Badan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Aset Dinas ;
 10. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas ;
 12. Mengoordinasikan, membina dan mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas ;

13. Merumuskan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup Badan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
14. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggungjawaban tugas,
Sekretariat terdiri dari :
Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
yang mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan dan merancang formulir penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis perencanaan untuk kemudahan dan tertib penyusunan program dan kegiatan Dins Tenaga Kerja Kab. Tapin;
 2. Menghimpun usulan program dan kegiatan dari semua unsur organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penyusunan program dan kegiatan Dins Tenaga Kerja Kab. Tapin
 3. Menyiapkan Net Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Net Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Net Dokumen Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Net Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Net Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Net Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan;
 4. Menyusun telaahan staf mengenai rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin berdasarkan data dan informasi perencanaan anggaran dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
 5. Melaksanakan telaah dan analisis dokumen Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, serta data pendukung lainnya dan membandingkannya dengan Dokumen Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui realisasi kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Tapin;

6. Menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis penyusunan pelaporan dan prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan;
7. Menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tapin Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis penyusunan pelaporan dan prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan;
8. Menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Tapin Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis penyusunan pelaporan dan prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan;
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Memimpin Sub Bagian dalam melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai program kerja Sekretariat serta Rencana Kegiatan tahun lalu untuk penetapan atasan dan menjadi pedoman kerja;

Mengadakan kerjasama dengan satuan/unit kerja/instansi terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
4. Memberi petunjuk/arahan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
5. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja dan juknis penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
6. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
8. Menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kemudahan dan kelancaran pendokumentasian arsip-arsip dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
9. Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk tertib ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
10. Melaksanakan kegiatan pembinaan ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kinerja ASN dan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;

11. Memantau dan mengendalikan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi perjalanan Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
12. Melakukan pengadministrasian dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
13. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung Dinas Tenaga Kerja sesuai prosedur dan rencana Kegiatan Sub Bagian untuk optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan gedung Dinas Tenaga Kerja ;
14. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan Dinas Tenaga Kerja sesuai petunjuk pelaksanaan untuk terpeliharanya ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kompleks Dinas Tenaga Kerja ;
15. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku agar diketahui realisasi kegiatan, masalah dan upaya pemecahannya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja oleh atasan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kerja. Yang membawahi pejabat fungsional pengantar kerja, Bidang Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja Mempunyai tugas :
 1. Merumuskan program kerja Bidang Peningkatan Kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan rencana strategis Dinas dan program kerja tahun lalu untuk penetapan atasan dan menjadi bahan dalam penyusunan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
 2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang sesuai program dan prosedur kerja agar terjalin keterpaduan program serta kerjasama yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang;
 5. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
 6. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas penempatan dan perluasan kesempatan Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk penetapan atasan;
 7. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program ideologi dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang;
 8. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang;

9. Menetapkan Telaahan Staf mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas penempatan dan perluasan kesempatan sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 10. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggungjawaban tugas;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja.
- Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari pejabat fungsional mediator
1. Merumuskan program kerja Bidang Hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja berdasarkan rencana strategis Dinas dan program kerja tahun lalu untuk penetapan atasan dan menjadi bahan dalam penyusunan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin;
 2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada Naskah Dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bidang sesuai program dan prosedur kerja agar terjalin keterpaduan program serta kerjasama yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang;
 5. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan pengembangan karier pegawai ;

6. Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program ideologi dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang;
 7. Mengkoordinasikan, membina, dan mengatur hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja di Kabupaten Tapin sesuai prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang;
 8. Menetapkan Telaahan Staf mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 9. Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggungjawaban tugas;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BLK Tapin terdiri dari :
- Kasubag. TU
 - Kelompok Jabatan Fungsional (Instruktur) :
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- #### 7. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kerja.

Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas :

- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga kerja;

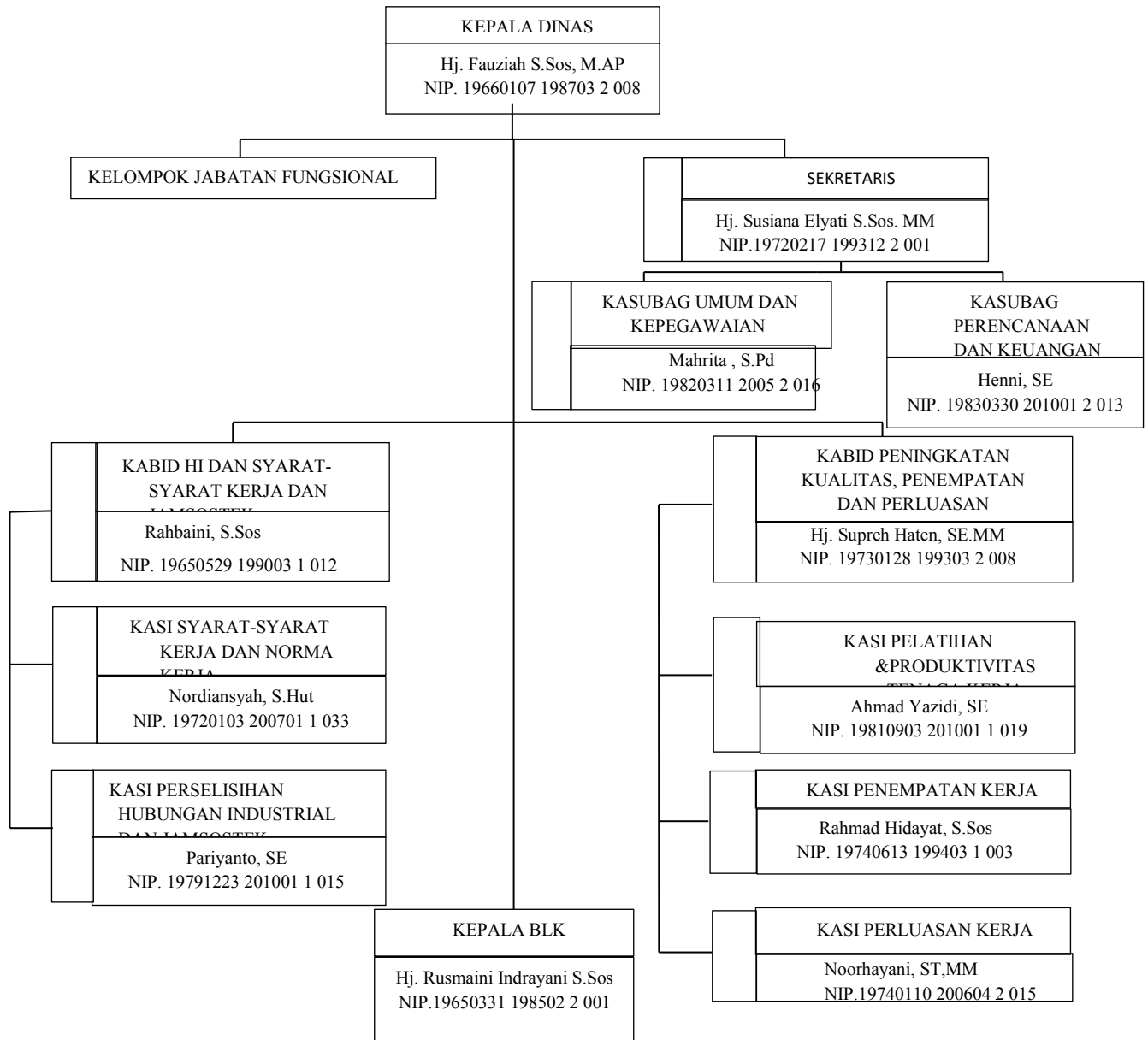
- c. Seksi Perluasan Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perluasan kerja.
8. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan syarat-syarat kerja.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin
- Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin terdiri dari :
- Kasubbag. TU UPTD BLK Tapin
 - Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin



4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam Kerja melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin beserta jabatannya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah 18 orang terdiri dari:

- Pejabat Struktural = 8 orang
- Staf / Pelaksana = 4 orang
- Jabatan Fungsional = 15 orang
- **Jumlah** = **27 orang**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022

No..	Golongan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1.	IV/c	-	1	
2.	IV/b	-	1	
3.	IV/a	1	2	
4.	III/d	4	4	
5.	III/c	-	2	
6.	III/b	2	1	
7.	III/a	5	4	
8.	II/d	-	-	
9.	II/c	-	-	
10	II/b	-	-	
11.	II/a	-	-	
		12	15	

Sedangkan Tingkat Pendidikan Formal sebagian besar Sarjana dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Formal															
		SD		SLTP		SLTA		D. III		D.IV		S.I		S.2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	0	3	1	7
2	Staf Pelaksana	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3
3	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	9	2	-	1	10	5
JUMLAH		-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	10	8	-	4	12	15
Total PNS 27																	

Berdasarkan gambar komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 4 (empat) orang, pegawai yang berpendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 18 (delapan belas) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan SLTA 4 (empat) orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Namun demikian, jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja masih banyak kekurangan terutama pada staf.

5. GAMBARAN UMUM

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
2. Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja, melalui kegiatan :
 - Bursa Kerja Online
 - Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai
 - Padat Karya Produktif
 - Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia
3. Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat kerja dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja, dengan melakukan kegiatan Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;
5. Penanganan masalah kesehatan keselamatan kerja, pengawasan tenaga kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Disamping itu terdapat juga (Balai Latihan Kerja) BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain melaksanakan kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin (jurusan menjahit, bordir, sepeda motor, las, elektronik, bangunan);
- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin.

6. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Tapin.
14. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

7. Laporan Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya (2021).

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memperbaiki Crosscutting dan mengkoordinasikan dengan SKPD yang terkait.	Masih dalam proses perbaikan
2	Pengumpulan data Kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Pada Dinas Tenaga Kerja untuk teknologi informasi masih belum di laksanakan karena untuk teknologi informasi setidaknya menggunakan anggaran.
3	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam pemberian Reward dan Punishment.	Pada Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan pemberian Reward kepada bidang yang nilai pengukuran kinerjanya paling tinggi.
4	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional.	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 diperbaiki dengan menambahkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
5	Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	
6	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit, dan dilaksanakan secara berjenjang.	

8. Permasalahan dan Isu Strategis yang telah dilakukan dalam Kinerja SKPD.

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	<p>Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial berkisar pada perselisihan terkait hak (muncul akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama), perselisihan kepentingan (perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama), perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja (perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan (Perselisihan ini merupakan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh yang satu dengan serikat pekerja atau buruh lain yang ada dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan).</p>	<p>Hal pertama yang perlu dilaksanakan adalah perlunya dilakukan bimbingan langsung kepada perusahaan agar dapat membentuk LKS Bipartit yang mana saat ini masih minim adanya. Dengan adanya bimbingan secara langsung diharapkan apabila ada kendala ataupun hambatan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit dapat segera dicarikan penyelesaian permasalahannya. Kemudian hal kedua yang perlu dilakukan adalah pembinaan berkelanjutan kepada LKS Bipartit yang sudah dibentuk di perusahaan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. LKS Bipartit dapat dikatakan berhasil jika dapat mewujudkan beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya kemitraan dan komitmen bersama dalam hubungan industrial yang harmonis • Terciptanya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta kelangsungan usaha bagi pengusaha • Berkurangnya perselisihan hubungan industrial • Perusahaan mendukung

		keberadaan dan aktivitas LKS Bipartit serta menganggap LKS Bipartit bagian dari perusahaan.
2	Belum banyak Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh perusahaan menengah dan kecil	Menyusun rencana pembinaan dan monitoring perusahaan
3	Belum banyak LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan besar	Menyusun rencana sosialisasi perusahaan-perusahaan
4	Kurangnya Instruktur Menjahit	Mengajukan penambahan Instruktur Menjahit
5	Kurangnya sarana dan Prasarana Workshop	Mengajukan proposal pembiayaan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
6	Ketertinggalan teknologi dan perangkat pelatihan ketrampilan dalam menghadapi kemajuan teknologi.	Memuat Sub Kegiatan baru pada Resntra 2024-2026 terkait rekening belanja Aplikasi teknologi.
7	Kegiatan pelatihan belum mendapatkan sertifikat kompetensi	Agar pelaksanaan Uji Kompetensi bisa dilaksanakan
8	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan 1
9	Kesulitan dalam hal Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	Mengusulkan SSH SSH ke BKAD dengan nilai / harga yang sudah sesuai dengan PPn + PPh, dll
10	Terbatasnya Pelaksanaan Kegiatan	DPA Perubahan yang sudah di tetapkan tidak perlu TS Persetujuan Pelaksanaan maupun persetujuan pembayaran karena memakan waktu yang cukup lama
11	Terlambatnya Penurunan Anggaran Daerah ke Dinas	Terlaksananya Pengesahan SK dipercepat sesuai alurnya
12	Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga memaksa dipilihnya pekerjaan yang beresiko dengan imbalan yang rendah.	Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja (meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai

		kebutuhan pasar kerja lokal, nasional dan internasional);
13	Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses Bursa Kerja sangat terhambat dan terbatasnya skill atau jurusan Pendidikan yang dibutuhkan perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi lowongan pekerjaan yang dicari.	Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia antara penduduk local dan penduduk pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari terjadinya masalah sosial kemasyarakatan;
14	Banyaknya penduduk yang berusia muda dan produktif sehingga memerlukan pembinaan ke arah kegiatan yang positif.	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja);
15	Terlambatnya dalam Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya dana daerah untuk pelaksanaan kegiatan
16	Penanganan PMI Nonprosedural belum optimal	Penyediaan anggaran biaya tak terduga untuk pemulangan PMI Nonprosedural
17	Pencegahan PMI Nonprosedural belum optimal	Penyediaan anggaran biaya transportasi dan penambahan biaya honorarium Tim Satgas Pencegahan PMI Nonprosdural
18	Jumlah peserta kegiatan penyediaan layanan antar kerja masih kurang	Penyediaan anggaran transportasi dan uang saku bagi peserta kegiatan penyediaan layanan antar kerja

9. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, yang mencerminkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2021. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) LRA (Realisasi keuangan) dan lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari disusunnya rencana strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor publik. RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, serta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan dan program. Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut

2. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama menuju kondisi masa depan yang diinginkan secara lebih nyata dan rasional, dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah.

Dalam rangka menata dan mengembangkan perekonomian yang merupakan bagian integral pembangunan Kabupaten Tapin, maka Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”**

Makna visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di atas yaitu:

**“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA “**

adalah melalui Pembinaan, Pelatihan serta Keterampilan yang kami berikan secara efektif dan efisien diharapkan dapat menciptakan Tenaga Kerja yang terampil dan handal serta siap pakai dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja diperusahaan atau dapat berusaha mandiri ditengah masyarakat

Misi adalah peran yang harus diemban atau dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, sekaligus menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola pengembangan kegiatan serta menjadi tuntunan operasional tentang berbagai hal yang ingin dilaksanakan.

Rumusan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- Misi ke –1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Misi ke –2 : Menciptakan Tenaga Kerja yang Profesional dalam memasuki Pasar Kerja.
- Misi ke –3 : Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan.

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja yang adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	<p>Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia antara penduduk local dan penduduk pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari terjadinya masalah sosial kemasyarakatan;</p> <p>Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada;</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja (meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, nasional dan internasional);</p> <p>Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia antara penduduk local dan penduduk pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari terjadinya masalah sosial kemasyarakatan;</p>

2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih	Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi (%)	Formasi Instruktur sesuai dengan pengajuan	Mengajukan penambahan Instruktur Menjahit
			Pengajuan sarana dan prasarana belum terlaksana	Mengajukan proposal pembiayaan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
			Anggaran untuk Uji Kompetensi tidak mencukupi	Agar pelaksanaan Uji Kompetensi bisa dilaksanakan
			Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja BLK Tapin (meningkatkan ketrampilan tenaga kerja serta meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja);	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja);
3.	Meningkatnya Hubungan Ketenagakerjaan Kualitas Industril	Persentase perselisihan kasus yang diselesaikan	Perlu adanya terbangun komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja, setiap kebijakan yang diambil dalam suatu perusahaan haruslah merupakan sebuah keputusan yang berasal dari hasil komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Artinya jangan	Hal pertama yang perlu dilaksanakan adalah perlunya dilakukan bimbingan langsung kepada perusahaan agar dapat membentuk LKS Bipartit yang mana saat ini masih minim adanya. Dengan adanya bimbingan secara

			<p>sebuah kebijakan merupakan keputusan salah satu pihak saja/perusahaan. Komunikasi yang mana kedua belah pihak lebih mengedepankan kepentingan bersama ketimbang pihaknya sendiri. Sebagai wadah untuk komunikasi antara pengusaha dan pekerja, maka perlu dalam sebuah perusahaan itu dibentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau unsur pekerja.</p>	<p>langsung diharapkan apabila ada kendala ataupun hambatan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit dapat segera dicarikan penyelesaian permasalahannya. Kemudian hal kedua yang perlu dilakukan adalah pembinaan berkelanjutan kepada LKS Bipartit yang sudah dibentuk di perusahaan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. LKS Bipartit dapat dikatakan berhasil jika dapat mewujudkan beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya kemitraan dan komitmen bersama dalam hubungan industrial yang harmonis • Terciptanya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta kelangsungan usaha bagi
--	--	--	---	--

				<p>pengusaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya perselisihan hubungan industrial <p>Perusahaan mendukung keberadaan dan aktivitas LKS Bipartit serta menganggap LKS Bipartit bagian dari perusahaan</p>
4.	<p>Meningkatnya penerapan tata kerja kelola yang layak, yaitu :</p> <p>1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</p> <p>2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)</p> <p>3. Struktur Skala Upah</p> <p>4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).</p>	<p>persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)</p>	<p>Pembinaan dan monitoring perusahaan-perusahaan</p>	<p>Menyusun rencana pembinaan dan monitoring perusahaan</p>
			<p>Soialisasi Perundangan Ketenagakerjaan tentang tata cara penyusunan LKS Bipartit</p>	<p>Menyusun rencana sosialisasi perusahaan-perusahaan</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Target (%)
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	$\frac{\text{jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$	70
2	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih	Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi (%)	$\frac{\text{jumlah angkatan kerja terlatih yang lulus uji kompetensi}}{\text{jumlah angkatan kerja terlatih}} \times 100\%$	75
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industril Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$	70
4	Meningkatnya penereapan tata kerja kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$	70

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2022.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Pembina Ulama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70 %
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja terlatih	Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi	75 %
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	70 %
4.	Meningkatnya penerapan tata kerja Kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah. 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kerja Kelola yang layak	70 %

No	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.514.955.711,-	Dana APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 280.964.104,-	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 408.020.300,-	
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 405.252.080,-	
JUMLAH		Rp 5.609.192.195,-	

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,



Hi. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660107 198703 2 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	95%
2	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian	Persentase Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana SKPD	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana SKPD	90%
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kualitas Laporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	90%
5	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan.	Persentase Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan.	90%

Rantau, 03 Januari 2022


Kepala Dinas,
Hj. FAUZIAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

Sekretaris,

H. BUDI SUMIHARSO, S.Sos, M.AP
NIP. 19640817 198701 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan.	Persentase Perselisihan Kasus yang Diselesaikan (Tempo 7 Hari)	70%
2.	Meningkatnya Penerapan tata kerja yang layak : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 3. Struktur Skala Upah . 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kerja Kelola yang layak (%)	70%

Program
Program Hubungan Industrial

Anggaran :
Rp. 405.252.080,-

Rantau, 03 Januari 2022


Kepala Dinas,
HI. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

Kabid Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek,

SITI AISYAH, S.Sos, MM
NIP. 19660106 198603 2 015

**FORMUZZLR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencari kerja yang berkualitas serta memperluas kesempatan peluang kerja bagi pencari kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70 %

Program :

Penempatan Tenaga Kerja

Anggaran :

Rp. 408.020.300,-

Rantau, 03 Januari 2022


Kepala Dinas,
Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

Kabid Peningkatan Kualitas,
Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja,

RIZA PAHLAVIE, S.IP, MM
NIP. 19711129 199203 1 006

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih	Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang Lulus Uji Kompetensi	75%

Program :

Anggaran:

1. Program Peningkatan Kualitas Kerja dan Produktivitas
Tenaga Kerja (APBD)

Rp. 268.892.604,-

Rantau, 03 Januari 2022



Hi. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

Kepala UPTD BLK,

Hi. RUSMAINI INDRAYANI, S.Sos
NIP. 19650331 198502 2 001

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Seksi Perluasan Kerja
 Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan
 Kesempatan Kerja
 Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	100%
2	Meningkatnya persentase pelatihan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Persentase Meningkatnya pelatihan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	100%

Kegiatan :

1. Perluasan Kesempatan Kerja
2. Peningkatan perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI

Anggaran :

Rp. 170.366.100,-

Rp. 400.000.000,-

JUMLAH

Rp. **570.366.100,-**

Rantau, 03 Januari 2022

Kabid Peningkatan Kualitas,
Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja,

RIZA PAHLAVIE, S.IP. MM
NIP. 19711129 199203 1 006

Pengantar Kerja,

NOORHAYANI, ST, MM
NIP. 19740110 200604 2 015

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga/LPKS	Persentase Meningkatnya Lembaga/ LPKS yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lembaga/LPKS	70%
2	Meningkatnya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Meningkatnya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	70%

Kegiatan :

1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Anggaran :

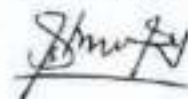
Rp. 12.071.500,-
Rp. 18.182.000,-
Rp. 30.253.500,-

Kabid Peningkatan Kualitas,
Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja,

RIZA PAHLAVIE, S.IP., MM
NIP. 19711129 199203 1 006

Rantau, 03 Januari 2022

Pengantar Kerja,



AHMAD YAZIDI, SE
NIP. 19810903 201001 1 019

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan
 Kesempatan Kerja
 Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Informasi Pelayanan Antar Kerja	Persentase Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Informasi Pelayanan Antar Kerja	80%
2	Meningkatnya Administrasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Meningkatnya Administrasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	85%
3	Meningkatnya Informasi Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Persentase Meningkatnya Informasi Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	80%
4	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu pada Pekerja Migran Indonesia.	Persentase Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Terpadu pada Pekerja Migran Indonesia.	80%

Kegiatan :

1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
3. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Anggaran :

Rp. 9.942.200,-
 Rp. 120.530.900,-
 Rp. 6.388.500,-
 Rp. 82.610.600,-

Rp. 219.472.200'-

Rantau, 03 Januari 2022

Kabid Peningkatan Kualitas,
 Penempatan dan Perluasan
 Kesempatan Kerja,


RIZA PAHLAVIE, S.IP, MM
 NIP. 19711129 199203 1 006

Pengantar Kerja,


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos
 NIP. 19740613 199403 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja
 Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
 Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerapan tata kerja yang layak : 1.Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 3.Struktur Skala Upah . 4.Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	70%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan Kasus yang Diselesaikan (Tempo 7 Hari)	70%

Kegiatan :


1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran:

Rp. 8.484.000,-
 Rp. 94.230.700,-
 Rp. 102.714.700,-

Rantau, 03 Januari 2022

Kabid Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek.


SITI AISYAH, S.Sos, MM
 NIP. 19660106 198003 2 015

Mediator Hubungan Industrial.


NORDIANSYAH, S.Hut
 NIP. 19720103 200701 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek
 Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
 Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerapan tata kerja yang layak : 1.Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 3.Struktur Skala Upah . 4 Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	80%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase Pengusaha/Pekerja yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	90%

Kegiatan :

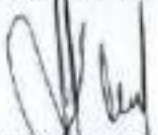
Anggaran:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Rp. 63.491.400,- |
| 2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan | Rp. 219.045.980,- |
| | Rp. 302.537.380,- |

Rantau, 03 Januari 2022

Kabid Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek,

Mediator Hubungan Industrial,


SITI AISYAH, S.Sos, MM
NIP. 19660106 198803 2 015


PARIYANTO, SE
NIP. 19791223 201001 1 018

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana SKPD	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana SKPD	90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.311.730.690,-
1.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	168.337.550,-
2.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	121.092.000,-
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.700.000,-
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	393.483.000,-
5.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	170.549.500,-
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	80.798.400,-
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.083.040,-
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	62.520.000,-
9.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22.500.000,-
10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.667.200,-

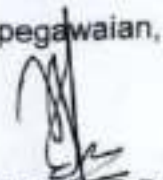
Rantau, 03 Januari 2022

Sekretaris,



BUDI SUMIHARSO, S.Sos, MAP
NIP. 19640817 198701 1 003

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian,



MAHRITA, S.Pd
NIP. 19820311 200501 2 016

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kualitas Laporan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	90%
2	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan	Persentase Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan	90%

Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

JUMLAH

Anggaran :

Rp. 3.184.970.021,-

Rp. 15.250.000,-

Rp. 3.050.000,-

Rp. 3.203.270.021,-

Rantau, 03 Januari 2022

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

Sekretaris,


BUDI SUMIHARSO, S.Sos. MAP
NIP. 19640817 198701 1 003

HENNI, SE

NIP. 19830330 201001 2 013

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1.	Terlaksananya Kegiatan, penatausahaan keuangan, dan Aset, administrasi Administrasi ketatalaksanaan, surat rumah tangga dan perlengkapan.	Penyusunan pengesahan kepegawaian, Pelatihan, surat menyurat, dan perlengkapan.	Tercapainya pelaksanaan kegiatan/ tata usaha/ administrasi.	70%

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin (APBD)
2. Pelatihan Berbasis kompetensi Non Bording (APBN)

Kepala UPTD BLK,



H. RUSMAINI INDRAYANI, S.Sos
NIP. 19650331 198502 2 001

Rantau, 3 Januari 2022

Kasubbag TU UPTD BLK,



ASNAWATI, S.Sos
NIP. 19860824 201001 2 020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

.Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d 75 %	Cukup Baik (CB)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang Baik (KB)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2021 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :

$$\text{RUMUS CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

1. Pengukuran Capaian Kinerja Utama Kepala SKPD

Target, realisasi, dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel .1.
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	70,28	100,4
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	75	52,40	69,87
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	70	80	114
4.	Meningkatnya penereapan tata kerja kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)	70	84,2	120

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 secara umum target kinerja dari 4 indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah >100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Baik”**.

Sasaran :
Meningkatnya kesempatan kerja

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kesempatan Kerja diukur melalui Indikator kinerja berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Penduduk yang bekerja di bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 103.316 orang sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 146.994 orang, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah 70,28 % seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja Tahun 2022}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja Tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{103.316}{146.994} \times 100\% = 70,28\%$

Sumber data : BPS Kabupaten Tapin

Tabel 1.2

Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70%	70,28	100,4%

Tabel 1.3

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2020 – 2021

Indikator Kinerja	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)	Ket.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,31	70,28	Turun 0,3 %

Sasaran :**Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih**

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas angkatan kerja diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja Sasaran strategis Angkatan Kerja Terlatih yang lulus uji kompetensi pada Tahun 2022 Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Angkatan kerja terlatih yang lulus kompetensi dibagi Jumlah Angkatan Kerja Terlatih dikali 100%.

Pada tahun 2022 Jumlah Angkatan kerja terlatih yang lulus uji kompetensi sebanyak 109 Orang sedangkan jumlah Angkatan kerja terlatih sebanyak 208 Orang, sehingga Persentase Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih adalah 52,40 % seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Formulasi Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang terlatih yang lulus kompetensi Tahun 2022}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Terlatih Tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{109}{208} \times 100\% = 52,40\%$

Sumber data : UPTD BLK TAPIN

Tabel 1.2

Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi	75	52,40	69,86

Tabel 1.3

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2020 – 2021

Indikator Kinerja	Capaian 2020 (%)	Capaian 2021 (%)	Ket.
Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi	77,2	69,86	Naik 7,14

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran, Sasaran strategis Meningkatkan kualitas hubungan industrial pada Tahun 2022 dicapai melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Jumlah Perselisihan kasus yang diselesaikan ada 5 kasus sedangkan jumlah kasus yang diselesaikan ada 4 kasus dan 1 kasus diteruskan ke provinsi, sehingga Persentase Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan sebesar 80% seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$

Sumber Data : Bidang Hubungan Industrial

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	70%	80 %	114 %

Tabel 3.3
Perbandingan dengan Capaian Tahun 2021 – 2022

Indikator Kinerja	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)	Ket.
Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	142 %	114 %	Turun 28 %

Sasaran :**Meningkatnya Penerapan Tata Kerja Kelola Yang Layak**

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Penerapan tata kerja kelola yang layak, diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran ,dicapai melalui pelaksanaan Program Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kerja Kelola yang layak sebanyak 96 Perusahaan sedangkan Jumlah Perusahaan sebanyak 114 Perusahaan, sehingga Persentase Meningkatnya Penerapan Tata Kerja Kelola Yang Layak adalah 84,2 % seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.	70%	84,2%	120 %

Tabel 3.2
Formulasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{96}{114} \times 100\% = 84,2 \%$

Sumber data : Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek
Perhitungan berdasarkan Permendagri NOMOR : 86 TAHUN 2017

Tabel 3.3
Perbandingan dengan Capaian Tahun 2021 – 2022

Indikator Kinerja	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)	Ket.
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.	120 %	114 %	Turun 6 %

2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning), dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai “dampak” tujuan dan sasaran, memberi petunjuk tentang hasil pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian outcome, sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi apa yang ingin diubah dari serangkaian ikhtiar (program) pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks ini, tujuan dan sasaran menjelaskan apa yang ingin diubah dari kondisi masa kini yang kurang ideal sebagaimana tercermin dari isu-isu dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Pada Tabel 3.1 akan dapat dilihat realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tapin periode tahun 2018-2023 :

Tabel 2.3.1
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke -					Capaian Pada Tahun ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pencari Kerja yang terserap di dunia kerja	40 %	0	0	0	0	22,11%	0	0	0	0	55,27%	0	0	0	0
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	0%	70 %	70 %	70%	70%	0%	70,05%	70,17%	70,31%	70,28%	0	100%	100,24%	100,44%	100,04%
3	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	0	75%	75%	75%	75%	0 %	44,99%	60,46%	57,9%	52,40%	0	59,99%	80,61%	77,2%	69,86%
4	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun	0	0	0	0	0	64,5%	66,12%	0	0	0	64,5%	66,12%	0	0	0
5	Persentase Penyelesaian Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun	0%	0%	50%	70%	70%	0	0	33,33%	100%	80%	0	0	66,66%	142%	114%
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kerja Kelola yang lalyak	0	0	0	70%	70%	0	0	0	93,63%	84,2%	0	0	0	133%	120%

Tabel 2.3.2
Realisasi dan Pendanaan dari Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi					Persentase(%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja pegawai	2.279.457.531	2.036.620.685	2.447.271.766	2.621.842.556	3.192.108.915	1.894.996.451	1.798.937.642	2.171.955.552	2.615.940.552	3.112.025.358	83,13	88,33	88,75	99,77	97,62
2	Belanja barang dan jasa	733.202.187	631.317.500	1.396.595.175	241.519.300	4.113.912.640	691.471.032	607.031.555	1.312.436.071	2.109.118.216	3.850.301.658	94,31	90,19	93,97	94,09	93,59
3	Belanja modal	59.000.000	11.000.000	468.500.000	287.239.000	378.977.450	59.000.000	1 10.200.000	467.252.000	284.352.100	342.533.900	100	92,73	99,73	98,99	90,38

Sumber data: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018-2022

Dari Tabel realisasi Keuangan diatas dari tahun 2018-2022 dapat dilihat secara umum bahwa realisasi Keuangan pada capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin telah tercapai dengan baik antara penganggaran dan kinerja sehingga diperoleh besaran presentasi diatas 90%. Dan dari anggaran yang tersedia dengan capaian kinerja telah berjalan seimbang dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

3. Analisis Benchmark terhadap IKU daerah lainnya

Tabel 3.1

Formulasi Realisasi Capaian dari Indikator Menurunnya Pengangguran

Indikator	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Menurunnya Pengangguran	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka Tahun 2022}}{\text{Jumlah angkatan kerja Tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{4.289}{103.316} \times 100\% = 4,15\%$

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran dan Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,60%	4,15 %	84,72 %

Tabel 3.3

Perbandingan dengan Realisasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 – 2022

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2022	Capaian 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96%	62,22%	4,15%	84,72%

Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

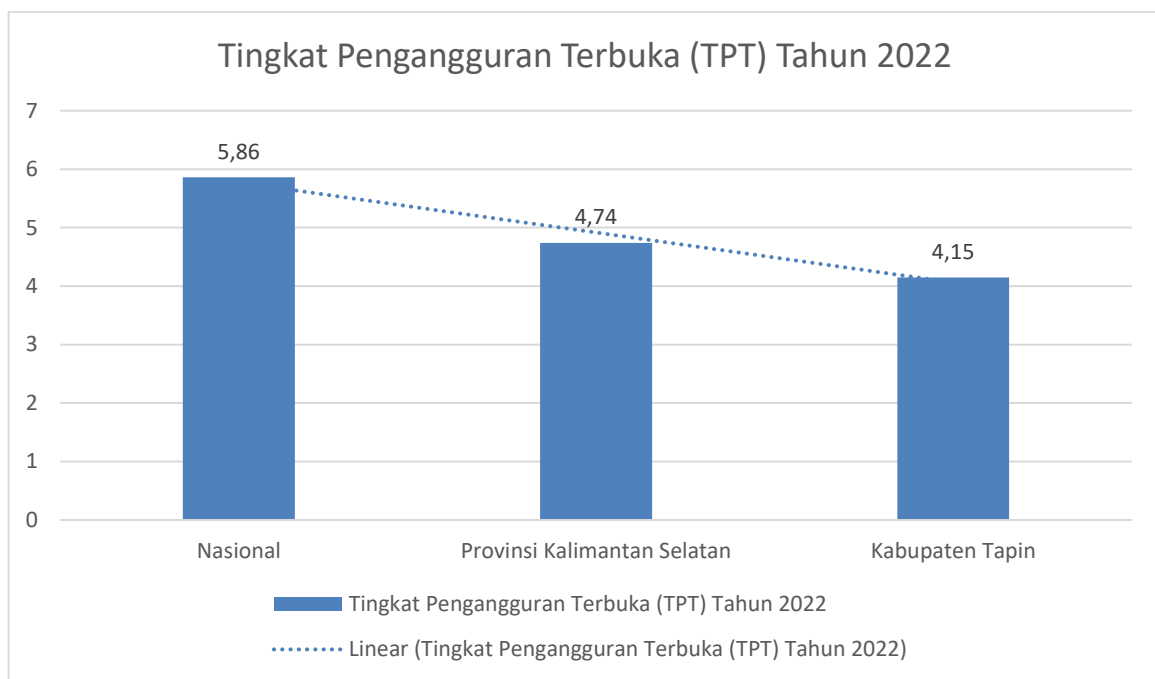
Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa **persentase menurunnya pengangguran** yang ada di Kabupaten Tapin tahun 2022 bertambah. Dengan kata lain persentase jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Tapin pada tahun 2021 sebesar 4,96% di bandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,15%, maka persentase tingkat pengangguran terbuka berkurang sebesar **22,5 %** yang artinya semakin menurun realisasinya maka semakin baik karena semakin banyak jumlah pengangguran yang berkurang.

Rumus Persentase Pencapaian yang bermakna negatif :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka didukung oleh banyaknya paket pelatihan yang diusulkan kecamatan di kegiatan musrenbang, sehingga banyak para pencari kerja yang dapat dilatih dan dapat berwirausaha sendiri, selain itu juga dengan adanya pokok pikiran dewan dalam mengusulkan kegiatan tenaga kerja yang diberdayakan sehingga banyak kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan dan pemberdayaan budi daya ayam petelor dan pedaging sehingga pengangguran di kabupaten tapin berkurang.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2022.



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Indikator Ketenagakerjaan dari skala nasional, provinsi dan kabupaten, pada kabupaten Tapin Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 lebih rendah dari provinsi dan skala nasional, dengan kata lain semakin rendah Tingkat Pengangguran Terbuka maka semakin baik pencapaiannya.

4. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja (IKU) dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.

No.	Program / Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
1.	Program Hubungan Industrial				
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang diberi Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	650 Orang	562 Orang	86%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	10 Kasus	5 Kasus	50%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen yang divalidasi	50 Dokumen	31 Dokumen	62%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pertemuan Rapat Ketenagakerjaan (Dewan Pengupahan)	3 Kali Pertemuan	3 Kali Pertemuan	100%
		Jumlah PTT Honoror di Kabupaten Tapin yang Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)	20.184 Orang	18.702 Orang	92%
2.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	96 Orang	96 Orang	100%

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 Lembaga	12 Lembaga	100%
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja				
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50 Orang	50 Orang	100%
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tersedianya Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	30 Orang	30 Orang	100%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja Online	1300 Orang	1456 Orang	112%
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Orang yang Mendapat Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	45 Orang	45 Orang	100%
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Layanan Terpadu	30 Orang	30 Orang	100%
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Pelatihan	10 Orang	12 Orang	120%

5. Realisasi Anggaran

Adapun tabel dibawah ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 per program dan kegiatan beserta persentase capaian dan sisa anggaran. Berikut tabel tersebut :

Tabel 5.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Perubahan APBD 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.812.312.965,00	4.645.600.650,00	96,54%	166.712.315,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.590.500,00	18.567.900,00	99,88%	22.600,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	18.590.500,00	18.567.900,00	99,88%	22.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.018.915,00	3.155.011.658,00	97,71%	73.007.275,00
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.968.915,00	3.112.025.358,00	97,71%	72.943.557,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.050.000,00	2.986.300,00	97,91%	63.700,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	968.344.550,00	918.186.554,00	94,82%	50.157.996,00
- Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	204.399.550,00	177.571.300,00	86,87%	26.828.250,00
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
- Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	136.758.000,00	126.860.600,00	92,76%	9.897.400,00
	13.700.000,00	13.695.000,00	99,96%	5.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.487.000,00	600.059.654,00	97,81%	13.427.346,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.051.600,00	204.369.400,00	90,01%	22.682.200,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.051.600,00	204.369.400,00	90,01%	22.682.200,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.267.400,00	106.833.456,00	96,02%	4.433.944,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.667.400,00	64.233.456,00	93,54%	4.433.944,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.600.000,00	42.600.000,00	100%	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.040.000,00	282.631.682,00	94,51%	16.408.318,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.520.000,00	56.477.249,00	90,33%	6.042.751,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000,00	5.605.000,00	41,52%	7.895.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.020.000,00	220.549.433,00	98,89%	2.470.567,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	264.914.100,00	243.723.950,00	92,00%	21.190.150,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	252.842.600,00	232.508.950,00	91,96%	20.333.650,00
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	252.842.600,00	232.508.950,00	91,96%	20.333.650,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500,00	11.215.000,00	92,90%	856.500,00
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500,00	11.215.000,00	92,90%	856.500,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.221.757.900,00	2.055.195.336,00	92,50%	166.562.564,00
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.732.096.200,00	1.606.604.136,00	92,75%	125.492.064,00
- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Ant	9.942.200,00	6.550.000,00	65,88%	3.392.200,00
- ar Kerja	18.182.000,00	18.162.000,00	99,89%	20.000,00
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1.703.972.000,00	1.581.892.136,00	92,84%	122.079.864,00
- Perluasan Kesempatan Kerja				
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	98.930.900,00	88.825.000,00	89,78%	10.105.900,00
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	98.930.900,00	88.825.000,00	89,78%	10.105.900,00
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	390.730.800,00	359.766.200,00	92,08%	30.964.600,00
- Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	365.281.000,00	349.072.400,00	95,56%	16.208.600,00
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	25.449.800,00	10.693.800,00	42,02%	14.756.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	386.014.040,00	364.420.980,00	94%	21.593.060,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.891.940,00	225.166.480,00	97,94%	4.725.460,00
- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.400.000,00	2.957.700,00	54,77%	2.442.300,00
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	224.491.940,00	222.208.780,00	98,98%	2.283.160,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	907.544.700,00	139.254.500	89%	16.867.600

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.491.400,00	70.464.700,00	84,40%	13.026.700,00
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.630.700,00	68.789.800,00	94,71%	3.840.900,00
JUMLAH	<u>7.684.999.005,00</u>	<u>7.308.940.916,00</u>	<u>95,11%</u>	<u>376.058.089,00</u>

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkannya. Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 5.2.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)	Realisasi Keuangan (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(8)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	70,31	100,44	96,30
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	75	57,9	77,2	98,34
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	70	100	142	92,67
4.	Meningkatnya penerapan tata kerja kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)	70	68,18	97	52

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian lindikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2.221.757.900,-	2.055.195.336,-	92,50
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	264.914.100,-	243.723.950,-	92,00
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	156.122.100,-	139.254.500,-	92,67
4.	Meningkatnya penereapan tata kerja kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)	229.891.940,-	225.166.480,-	97,94
Jumlah			1.120.255.400,-	1.076.944.210,-	96,13

**DOKUMENTASI PENGHARGAAN PADA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022**

**PENGHARGAAN HASAN WIRAJUDA DARI MENTERI LUAR NEGERI
PELINDUNGAN WNI AWARD 2022 DI JAKARTA**



**PENGHARGAAN DARI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAERAH
(RTKD 2022-2024)**



**PENGHARGAAN DARI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SINOPIK)**



**PENGHARGAAN DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENGANUGERAHAN LEMBAGA
KERJA SAMA (LKS) BIPARTIT AWARDS TAHUN 2022**



DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

KEGIATAN SOSIALISASI PELUANG KERJA PMI KE LUAR NEGERI
NARASUMBER KETUA BP2MI PUSAT



Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengupahan



Kegiatan Rapat Dewan Pengupahan



Kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Bukan Penerima Upah



Kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit



Kegiatan Pemanfaatan Layanan Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3)



Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja



Kegiatan Pelatihan dan Hibah Ayam Petelur



Kegiatan Pelatihan dan Hibah Ayam Pedaging



Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Menuju Akreditasi



Kegiatan Rapat Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural



Kegiatan Pelatihan Kecantikan Bagi Ibu-ibu Kader Desa Ketapang



Kegiatan SSW (Spesial Skill Worker) ke Jepang



Kegiatan Sosialisasi PMI ke Hongkong, Taiwan & Singapura



Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue



Kegiatan Pelatihan Menjahit



Kegiatan Pelatihan Kecantikan



KEGIATAN PELATIHAN BARBERSHOP



**KEGIATAN PELATIHAN AYAM PETELUR
(DANA TAMBAHAN INFLASI)**



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% dengan kategori **(Baik Sekali)** sebanyak **3 IKU**
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja lebih dari 55% - 75% dengan kategori **(Cukup)** sebanyak **1 IKU**.
3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebesar **101 %** dengan kategori **Baik Sekali**

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. SK Tim SAKIP OPD
2. Laporan Hasil Evaluasi LHE
3. Monev Rencana Aksi
4. Monev Indikator Kinerja Individu (IKI) Jenjang Staf



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA

Jalan Gub.H.Aberani Sulaiman No.129 Telepon (0517) 31673 Fax (0517) 31673

RANTAU

Kode Pos 71111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN NOMOR : 560 / 049 /SEKRT-2/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
pada tanggal : 25 Oktober 2021



Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Inspektur Kabupaten Tapin;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Target (%)	Sumber Data	Penanggung jawab
Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Jumlah penduduk yang bekerja x 100% jumlah penduduk usia kerja dikali	70	Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan Perluasan, Kesempatan	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih	Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi (%)	jumlah angkatan kerja terlatih yang lulus uji kompetensi x 100% jumlah angkatan kerja terlatih	75	UPTD BLK	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industri Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari)	Jumlah kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari) x 100% Jumlah Kasus	70	Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya penerapan tata kerja kelola yang layak, yaitu: 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS)	persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak x 100% jumlah perusahaan	70	Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek	Dinas Tenaga Kerja

Rantau, 25 Oktober 2021



HI. FAUZIAH, S.Sos. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Gub.H.Aberani Sulaiman No.129 Telepon (0517) 31673 Fax (0517) 31673
RANTAU Kode Pos 71111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN NOMOR : 009A Tahun 2022

TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 - Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
 3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
 4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
 5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
 6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
 7. Menyusun laporan kinerja;
 8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
 11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 29 Maret 2022



Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin
Nomor : 009a Tahun 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Pengarah
2.	H. BUDI SUMIHARSO, S.Sos, M.AP	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Penanggung Jawab
3.	HENNI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	REZA FAHLAVIE, S.IP, MM	Kepala Bidang Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
5.	SITI AISYAH, S. Sos, MM	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek	Anggota
6.	Hj. RUSMAINI INDRAYANI, S. Sos	Kepala Badan Balai Pelatihan Kerja (BLK)	Anggota
7.	MAHRITA, S.Pd	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	AHMAD YAZIDI, SE	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
9.	NORHAYANI, S.Sos, MM	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
10.	RAHMAT HIDAYAT, S. Sos	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
11.	PARIYANTO, SE	Kasi Hubungan Industrial dan	Anggota
12.	NORDIANYSAH, S. Hut	Kasi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja	Anggota
13.	ASNAWATI, S. Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLK	Anggota
14.	ARIZKA SOFIYANA MAHARANI, SE	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
15.	ENDAH PURNAMA SARI, S.AK	Penata Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 29 Maret 2022



Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Rembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI

Nomor 700/Reg/096/AKIP/WIL.I/VIII/INSP/2022
Tanggal 15 Agustus 2022

O B R I K :

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TAPIN



Nomor : 700/Reg/096/AKIP/WIL.I/VIII/INSP/2022 Rantau, 15 Agustus 2022
Lampiran : Kertas Kerja Evaluasi
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2021.
Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Di-
Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasikan hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin **Sangat Baik (BB)** dengan nilai **76,25**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	28,80	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	20,63	21,60
c. Pelaporan Kinerja	15	12,85	10,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,80	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	82,08	76,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	BB

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki *Crosscutting* dan mengkoordinasikan dengan SKPD yang terkait.
2. Pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*.

4. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional.
5. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit, dan dilaksanakan secara berjenjang.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur Kabupaten,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700722 200501 1 013

Catatan:

Data penilaian terlampir.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,6
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis,	9,00	BB	7,2
Kriteria:				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan			
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			

4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
7	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,6
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,3
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,8

3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	88	2,4
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4,50	B	3,15
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,25

4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kena/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			

BB

76,25

RENCANA AKSI SKPD DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator IKU	Target Tahunan IKU	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Output Tahunan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan				Anggaran	Penanggung Jawab
								TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja	30 Orang	-	30 Orang	-	-	9.942.200	Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
					Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah orang yang diberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	50 Orang	-	50 Orang	-	-	18.182.000	
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan layanan pelatihan	10 Orang	-	10 Orang	-	-	1.703.972.000	
					Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kartu AK1	1300 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	98.930.900	
					Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (CPMI)/Pekerja migran indonesia (PMI)	Jumlah orang yang mendapatkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	45 Orang	-	-	45 Orang	-	365.281.000	
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Layanan Terpadu	30 Orang	-	30 Orang	-	-	25.449.800	

					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12 Lembaga	-	-	12 Lembaga	12 Lembaga	12.071.500	
2	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih	Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang Berkualitas	75%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	96 Orang	-	-	96 Orang	-	252.842.600	UPTD BLK TAPIN
3	Meningkatnya Penerapan tata kerja kelola yang layak yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah. 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS).	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak	70%	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen yang divalidasi	50 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.400.000	Bidang Hubungan Industrial, Syarat - syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pertemuan Rapat Ketenagakerjaan (Dewan Pengupahan)	3 Kali Pertemuan	1 Kali Pertemuan	-	1 Kali Pertemuan	1 Kali Pertemuan	224.491.940	
						Jumlah PTT Honorer di Kabupaten Tapin yang luran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)	20.184 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang		

4	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan Kasus yang Diselesaikan (tempo 7 hari)	70%	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang diberi Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	650 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	50 Orang	83.491.400	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	10 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	72.630.700	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA

Jalan Gub.H.Aberani Sulaiman No.129 Telepon (0517) 31673 Fax (0517) 31673
RANTAU Kode Pos 71111

Nomor : 560/075/Sekret.I/DTK/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Kinerja dan Keuangan
Triwulan I T. A 2022

Rantau 04 April 2022

Kepada Yth :
Seluruh Pejabat Eselon III
dan Eselon IV Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten
Tapin
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun Anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan IV dalam rangka Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 05 April 2022
Waktu : Pukul 10.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja
Acara : Rapat Pembahasan Laporan Monev Capaian Kinerja dan
Keuangan Triwulan I T.A 2022

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



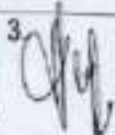

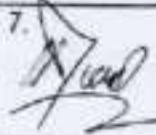

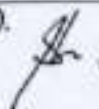
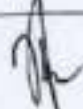

Kepala Dinas

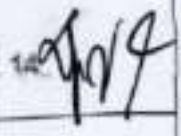




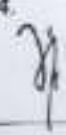
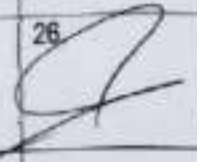
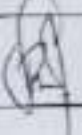



Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

**DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
TRIMULAN III TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Selasa, 5 April 2022
Waktu : 10.00 WITA
Tempat : Aula Sekretariat Disnaker Kabupaten Tapin

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP NIP. 19660107 198703 2 008	Kepala Dinas	1. 
2	Budi Sumiharso, S. Sos, M.AP NIP. 19640817 198701 1 003	Sekretaris	2. 
3	Siti Aisyah, S. Sos, MM NIP. 19660106 198603 2 015	Kabid HI, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek	3. 
4	Riza Fahlavie, S.IP, MM NIP. 19711129 199203 1 006	Kabid Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	4. 
5	Hj. Rusmaini Indrayani, S. Sos NIP. 19650331 198502 2 001	Kepala UPTD BLK Tapin	5. 
6	Rahmad Hidayat, S. Sos NIP. 19740613 199403 1 003	JF. Penempatan Kerja	6. 
7	Nordiansyah, S. Hut NIP. 19720103 200701 1 003	JF. Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja	7. 
8	Pariyanto, SE NIP. 19791223 201001 1 018	JF. Hubungan Industrial dan Jamsostek	8. 
9	Noorhayani, ST, MM NIP. 19740110 200604 2 015	JF. Perluasan Kerja	9. 
10	Ahmad Yazidi, SE NIP. 19810903 201001 1 019	JF. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	10. 
11	Mahrifa, S.Pd NIP. 19820311 200501 2 016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	11. 
12	Henni, SE NIP. 19830330 201001 2 013	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	12. 
13	Asnawati, S. Sos NIP. 19860824 201001 2 020	Kasubbag TU UPTD BLK Tapin	13. 

14	Arizka Sofiyana Maharani, SE NIP. 19950224 202012 2 007	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
15	Endah Pumama Sari, S.Ak NIP. 19960628 202012 2007	Penata Keuangan	15.	
16	Hj. Dodoah Resmiati NIP. 19650730 198601 2 007	Instruktur		16.
17	Hj. Puji Astuti, S.Sos NIP. 19650822 198701 2 001	Instruktur	17.	
18	Yehosapat Paulus Haryono Timisela, ST NIP. 19851014 201903 1 003	Instruktur		18. 
19	Hasan Sajali, ST NIP. 19960712 201903 1 001	Instruktur	19.	
20	M. Akbar Tanjung, S. Kom NIP. 19910113 202012 1 003	Instruktur		20. 
21	Bayu Aji, S. Kom NIP. 19920116 202012 1 002	instruktur	21.	
22	Ermayana NIP. 19721222 200604 2 004	Calon Instruktur		22.
23	Sapjuandani S.Kom NIP. 19840509 200604 1 004	Instruktur	23.	
24	Irpan Apriansyah NIP. 19810426 201402 1 003	Calon Instruktur		24. 
25	Rifa Atul Mahmudah NIP. 19930712 201402 2 002	Bendahara Pengeluaran / Calon Instruktur	25.	
26	Husin Habibi NIP. 19741229 200701 1 017	Staf Umpaeg		26. 
27	Muhammad Habibie, S.Kep	PTT	27	
28	Sukmana Fithra Rizana, S.IP	PTT		28. 
29	Rianty Novanila Siregar, ST	PTT	29	
30	Ade Setiadi, S.Pd	PTT		30. 



**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Unit Kerja : Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kemampuan Kerja

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Ket		
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Tersedianya Sumber Daya Pelajaran Antar Kerja	Jumlah Tersedianya Sumber Daya Pelajaran Antar Kerja	-	30 Orang	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	
2	Tertabungnya penyediaan dan pembinaan jabatan bagi Puncak Kerja	Jumlah Orang Pemukiman dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	-	50 Orang	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	
3	Tertabungannya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pemasarja Online	Jumlah Orang Yang mendapatkan informasi Pemasarja Online	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	216 Orang	0	0	0	0	0	66%	
4	Tertabungannya peningkatan partisipasi dan kompetensi Calon Pemasarja Indonesia Militeria Indonesia	Jumlah Orang yang mendapat kompetensi Calon Pemasarja Indonesia (PMI)	-	-	61 Orang	-	-	-	-	0	-	-	0%	
5	Tersedianya Layanan Terpadu Pada Calon Pemasarja Militeria	Jumlah Pemasarja Militeria yang Mendapatkan Layanan Terpadu	-	30 Orang	1 Perda	-	-	-	-	0	-	-	0%	
6	Terdatanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Online (Lembaga)	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Online (Lembaga)	-	-	12 Lembaga	12 Lembaga	-	-	-	0	-	-	0%	
7	Meningkatnya kemampuan Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Pelatihan	-	10 Orang	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pelaksanaan Anggaran di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 158.490.300	Rp 158.490.300	0%
01.01	Persediaan Sumber Daya Pelayan Antar Kota					Rp -	Rp 9.942.200	Rp 9.942.200	0%
01.02	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					Rp -	Rp 18.182.000	Rp 18.182.000	0%
01.03	Perbaikan Ketersediaan Kerja					Rp -	Rp 170.366.100	Rp 170.366.100	0%
2	Pengelolaan Anggaran Pasar Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120.530.900	Rp 120.530.900	0%
02.01	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Pasar Kerja					Rp -	Rp 120.530.900	Rp 120.530.900	0%
3	Pertanggung-jawaban (PJS) dan Penerimaan Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 488.999.100	Rp 488.999.100	0%
03.01	Pendanaan Pertanggung-jawaban dan Komporansi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/PuM) Pekerja Migran					Rp -	Rp 406.388.500	Rp 406.388.500	0%
03.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					Rp -	Rp 82.610.600	Rp 82.610.600	0%
4	Pembinaan Lembaga Perbaikan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
04.01	Pembinaan Lembaga Perbaikan Kerja Swasta					Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
Jumlah						Rp -	Rp 820.091.800	Rp 820.091.800	0%

Rantau, 31 Maret 2022

Kabid Peningkatan Kualitas Penempatan dan
Pencapaian Kompetensi Kerja

RUZA PAHRAWIE, S.P., MM
NIP. 19741129 1992200 1 009



HI FAUZAN, S. Sos., M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
 Triwulan : 1 (satu)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sesans Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Keti
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Terlaksananya Pengawasan/Pencapaian PPI/PPGB PKWT LKS Bagan/SP/SS CC bagi Persehat	Jumlah Dokumen yang diupload	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	17%	Tidak ada Perusahaan baru yang melapor
2	Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jamsosokial Tenaga Kerja serta Pengumpulan	Jumlah Pendaftaran Reguk Katerangan/kegiatan (Dewan Penggajian)	1 Kali Pertemuan	-	1 Kali Pertemuan	1 Kali Pertemuan	0 Pertemuan	0	-	0	0%	SK Dewan Penggajian Belum direvisi
3	Terlaksananya Pencapaian Pendaftaran Hubungan Industrial Akogik Kurj dan Penulapac Penulapac	Jumlah Orang Yang dior Soatibasi Pendaftaran Hubungan Industrial Akogik Kurj dan Penulapac Penulapac	150 Orang	200 Orang	250 Orang	50 Orang	0	0	0	33%	Banyaknya Kasus / Aduan yang Masuki dan Perlu Penulapac Segera	
4	Terlaksananya Pendaftaran Penulapac Hubungan Industrial	Pendaftaran Penulapac Hubungan Industrial	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	0	0	0	100%	-

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pengolahan Peraturan Perusahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.698.080	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 32.698.080	Rp 227.529.980	Rp 194.831.900	14%
01-01	Pengesaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					Rp -	Rp 8.484.000	Rp 8.484.000	0%
01-02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sarana Maksudung Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguatan	Rp 32.698.080				Rp 32.698.080	Rp 219.045.980	Rp 186.347.900	15%
2	Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 177.722.100	Rp 177.722.100	0%
02-01	Promogran Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berstatus/Berdinas pada Kaperntugan di 1 (satu) di Daerah Kabupaten/Kota					Rp -	Rp 83.491.400	Rp 83.491.400	0%
02-02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,					Rp -	Rp 94.230.700	Rp 94.230.700	0%
JUMLAH						Rp 32.698.080,00	Rp 435.252.980	Rp 372.554.000	8%

Rantau, 31 Maret 2022

Kabid Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja



Hi Fakhri, S.Sos M.AP
NIP. 19681071987032008

SELAHART, S.Sos.MM
NIP. 196601051986032015

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Tingkatan
Tahun Anggaran

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Sekretariat
1 (satu)
2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	7 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	0	0	0	0
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Jumlah Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0
3	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	0	0	0	0

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.250.000	Rp 15.250.000	0%	
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.250.000	Rp 15.250.000	0%	
0	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.188.020.021	Rp 3.188.020.021	0%	
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.184.970.021	Rp 3.184.970.021	0%	
JUMLAH						Rp 3.203.270.021	Rp 3.203.270.021	0%	


 Kepala Dinas
 H. FADZAN, S.Sos, M.AP
 NIP. 19660103198703 2 008


 Sekretaris
 H. BUDI SUMARTOSO, S.Sos, M.AP
 NIP. 19640817198701 1 003

Banjar, 31 Maret 2022
 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

 HENRISE
 NIP. 19630330201001 2 013

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPT BLK Kabupaten Tapin
 Tiwulan : 1 (satu)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	-	-	96 Orang	-	-	0	-	0%		

No.	Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp 268.892.604,00	Rp 268.892.604,00	0%	
JUMLAH					Rp0	Rp 268.892.604,00	Rp 268.892.604,00	0%	


 Kepala Dinas
Hi. Fauziah, S.Sos, M.AP
 NIP. 19660107 198703 2 008

Rantau, 31 Maret 2022
 Kepala UPTD BLK

Hi. Ruzmalni Indriyani, S.Sos
 NIP. 19650331 198502 2 001

Unit Organisasi
Unit Kerja
Tentukan
Tahun Anggaran

MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN
Sektor/Unit
1 (satu)


2022

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Realisasi (%)	Ket	
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	Tersedianya Perakitan dan Pemasangan Kanvas	Melaku terdapatnya perakitan dan pemasangan kanvas	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Melaku Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
4	Penyusunan "Pengorganisasian" Rapak Komando dan Koordinasi SOPD	Pengorganisasian Rapak Komando dan Koordinasi SOPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
5	Tersedianya Perakitan dan Mekanik Lainnya	Selesai Tersedianya Perakitan dan Mekanik Lainnya (buah)	-	42 unit	-	-	-	0	-	-	-	0%	
6	Tersedianya Jasa Konstruksi Sander Daya Air dan Listrik	Melaku Tersedianya Jasa Konstruksi, Sander Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
7	Tersedianya Uplat Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Melaku Tersedianya Uplat Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
8	Tersedianya Pajal kendaraan dinas pejabat	Melaku Penyediaan Pajal kendaraan dinas jabatan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
9	Tersedianya Jasa pemenuhan perikatan dan mesin lainnya	Melaku Pemenuhan Jasa pemenuhan perikatan dan mesin lainnya	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	0	0	100%	
10	Tersedianya Perbaikan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Perbaikan gedung kantor dan bangunan lainnya (mali)	-	5 Kali	-	-	-	-	-	0	-	0%	

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 698.987.500,00	Rp 698.987.500,00	0%	
01:01	Penyediaan Pegawai dan Peningkatan Kinerja					Rp 168.337.500,00	Rp 168.337.500,00	0%	
01:02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp 121.000.000,00	Rp 121.000.000,00	0%	
01:03	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian					Rp 13.700.000,00	Rp 13.700.000,00	0%	
01:04	Penyediaan Barang Regal Konstruksi dan Konsumsi SKPD					Rp 300.400.000,00	Rp 300.400.000,00	0%	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 170.540.500,00	Rp 170.540.500,00	0%	
02:01	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya					Rp 170.540.500,00	Rp 170.540.500,00	0%	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 131.881.440,00	Rp 131.881.440,00	0%	
03:01	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sertifikasi dan Jasa Lain-lain					Rp 80.798.400,00	Rp 80.798.400,00	0%	
03:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp 51.083.040,00	Rp 51.083.040,00	0%	
4	Pembelitan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 166.400.000,00	Rp 166.400.000,00	0%	
04:01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak					Rp 33.642.000,00	Rp 33.642.000,00	0%	
04:02	Penuliharaan Perakitan dan Mebel Lainnya					Rp 13.350.000,00	Rp 13.350.000,00	0%	
04:03	Pembelitan/Rendahnya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya					Rp 129.208.000,00	Rp 129.208.000,00	0%	
JUMLAH						Rp -	Rp 1.185.459.290,00	Rp 1.185.459.290,00	0%



Ketika Dinas
 H. FAKHRUL H. Sidiq, M.AP
 NIP. 196401011987012008






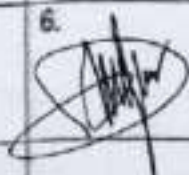

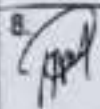

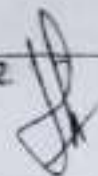
Sekretaris

 H. Rofiqul Anwar, S.Sos, M.AP
 NIP. 196406171987011003





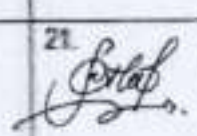
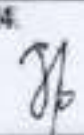
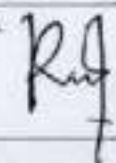
Pangkat, 31 Maret 2022
 Kasubag Urusan dan Kepegawaian

 M. Nur Hafid, Pd
 NIP. 196203112005012016

**DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2022
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Aula Sekretariat Disnaker Kabupaten Tapin

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
			1.	2.
1	Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP NIP. 19660107 198703 2 008	Kepala Dinas		
2	Budi Sumiharso, S. Sos, M.AP NIP. 19640817 198701 1 003	Sekretaris		
3	Siti Aisyah, S. Sos, MM NIP. 19660106 198603 2 015	Kabid HI, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek		
4	Riza Fahri, S.IP, MM NIP. 19711129 199203 1 006	Kabid Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		
5	Hj. Rusmaini Indrayani, S. Sos NIP. 19650331 198502 2 001	Kepala UPTD BLK Tapin		
6	Rahmad Hidayat, S. Sos NIP. 19740613 199403 1 003	Pengantar Kerja		
7	Nordiansyah, S. Hut NIP. 19720103 200701 1 003	Mediator		
8	Pariyanto, SE NIP. 19791223 201001 1 018	Mediator		
9	Noorhayani, ST, MM NIP. 19740110 200604 2 015	Pengantar Kerja		
10	Ahmad Yazidi, SE NIP. 19810903 201001 1 019	Pengantar Kerja		
11	Mahrifa, S.Pd NIP. 19820311 200501 2 016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
12	Henni, SE NIP. 19830330 201001 2 013	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		
13	Asnawati, S. Sos NIP. 19660106 198603 2 015	Kasubbag TU UPTD BLK Tapin		

14	Arizka Sofiyana Maharani, SE NIP. 19950224 202012 2 007	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		14. 
15	Endah Purnama Sari, S.Ak NIP. 19950626 202012 2007	Bendahara Pengeluaran	15. 	
16	Hj. Dodoh Resmiali NIP. 19650730 198601 2 007	Instruktur		16. 
17	Hj. Puji Astuti, S.Sos NIP. 19650822 198701 2 001	Instruktur	17. 	
18	Yehosapat Paulus Haryono Timsela, ST NIP. 19851014 201903 1 003	Instruktur		18. 
19	Hasan Sajali, ST NIP. 19960712 201903 1 001	Instruktur	19. 	
20	M. Akbar Tanjung, S. Kom NIP. 19910113 202012 1 003	Instruktur		20.
21	Bayu Aji, S. Kom NIP. 19920116 202012 1 002	Instruktur	21. 	
22	Ermayana NIP. 19721222 200604 2 004	Instruktur		22. 
23	Sapjuandani S.Kom NIP. 19840509 200604 1 004	Instruktur	23. 	
24	Ipan Apriansyah NIP. 19810426 201402 1 003	Instruktur		24. 
25	Rifa Atul Mahmudah NIP. 19930712 201402 2 002	Instruktur	25. 	
26	Husin Habibi NIP. 19741229 200701 1 017	Staf Umpaeg		26.

27	Muhammad Habibie, S.Kep	PTT	27	
28	Sukmana Fithra Rizana, S.IP	PTT		28
29	Rianty Novanita Siregar, ST	PTT	29 <i>JAF</i>	<i>f.</i>
30	Ade Setiadi, S.Pd	PTT		30
31	Thalia Silva Gunawan Putri	PTT	31	
32	Joko Prio Nusantoro	PTT		32
33	Adhi Priyono	PTT	33 <i>SP</i>	
34	Sonia Nurul Amanda Harahap, S.Tp	PTT		34 <i>SP</i>
35	Muhammad Marwan Algiardi, SE	PTT	35	



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP
 NIP. 19660107 198703 2 008



**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Sekretariat
 Tahun : 2 (dua)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	0	0
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0
3	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	Rp 5.065.000	Rp -	Rp -	Rp 5.065.000	Rp 15.250.000	10.185.000	33%
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Rp -	Rp 5.065.000	Rp -	Rp -	Rp 5.065.000	Rp 15.250.000	10.185.000	33%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 1.224.699.838	Rp -	Rp -	Rp 1.224.699.838	Rp 3.188.020.021	1.963.320.183	38%
0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp 1.222.004.838	Rp -	Rp -	Rp 1.222.004.838	Rp 3.184.570.021	1.962.565.183	38%
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	Rp 2.695.000	Rp -	Rp -	Rp 2.695.000	Rp 3.050.000	355.000	88%
JUMLAH						Rp 1.229.764.838	Rp 3.203.270.021	1.973.505.183	38%


Kepala Dinas
H. FAUZAN S. Sos, M.AP
 NIP. 19660107 198703 2 008

Rantau, 30 Juni 2022
 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

HENNY SE
 NIP. 19830330 201001 2 013

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 Triwulan : 2 (dua)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Tersedianya Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tersedianya Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	-	30 Orang	-	-	-	0	-	-	0%	Kegiatan Digeser Ke Triwulan IV
2	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	-	50 Orang	-	-	-	40 Orang	-	-	80%	
3	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Orang yang mendapatkan informasi Pasar Kerja Online	325 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	216 Orang	541 Orang	0	0	155%	
4	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Orang yang mendapat kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	45 Orang	-	-	45 Orang	0	-	100%	Kegiatan Digeser Ke Triwulan II
5	Tersedianya Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Layanan Terpadu	-	30 Orang	1 Perda	-	-	30 Orang	-	-	100%	
6	Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	-	-	12 Lembaga	12 Lembaga	-	-	0	0	0%	
7	Meningkatnya Persentase Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Pelatihan	-	10 Orang	-	-	-	0	-	-	0%	Kegiatan Digeser Ke Triwulan III

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 11.946.000	Rp -	Rp -	Rp 11.946.000	Rp 197.470.300	Rp 185.524.300	6%
01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.942.200	Rp 9.942.200	0%
01.02	Penyuluhan dan Simbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp -	Rp 11.946.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.946.000	Rp 18.182.000	Rp 6.236.000	66%
01.03	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 169.346.100	Rp 169.346.100	0%
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp -	Rp 35.875.000	Rp -	Rp -	Rp 35.875.000	Rp 120.530.900	Rp 84.655.900	30%
02.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp -	Rp 35.875.000,00	Rp -	Rp -	Rp 35.875.000	Rp 120.530.900	Rp 84.655.900	30%
3	Perlindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 7.600.000	Rp -	Rp -	Rp 7.600.000	Rp 485.995.100	Rp 481.395.100	2%
03.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Rp -	Rp 6.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000	Rp 406.388.500	Rp 400.388.500	1%
03.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp -	Rp 1.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 82.610.500	Rp 81.010.600	2%
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
04.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
JUMLAH						Rp 55.421.000	Rp 819.071.800	Rp 763.650.800	7%

Rantau, 30 Juni 2022

Kabid Peningkatan Kualitas, Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja

RIZA PAHLAVIE, S.IP, MM
NIP. 19711129 199230 1 008



**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
 Triwulan : 2 (dua)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Tertaksananya Pengesahan/Pencatatan RPPKB, PKWT, LKS Bipartit, SP/SL, OC bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen yang divalidasi	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	0	0	100%	Tidak ada Perusahaan lain yang melaporkan
2	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pertemuan Rapat Kelengkapan Kerja (Dewan Pengupahan)	1 Kali Pertemuan	-	1 Kali Pertemuan	1 Kali Pertemuan	0 Pertemuan	0	-	0	0%	SK Dewan Pengupahan Belum direvisi
		Jumlah PTT Honoror di Kabupaten Tapin yang luran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)	5046 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	3.364 Orang	3.364 Orang	-	0	67%	SK Dewan Pengupahan Belum direvisi
3	Tertaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Orang Yang diberi Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	150 Orang	200 Orang	250 Orang	50 Orang	50 Orang	163 Orang	0	0	75%	Banyaknya Agenda Kegiatan Yang Dilaksanakan
4	Tertaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Kasus	2	2 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	1	0	0	50%	Tidak Ada Aduan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.598.080	Rp 50.247.120	Rp -	Rp -	Rp 82.845.200	Rp 227.529.980	Rp 144.684.780	36%
01:01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp -	Rp 1.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 8.494.000	Rp 7.294.000	14%
01:02	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Saran Hubungan	Rp 32.598.080	Rp 49.047.120,00	Rp -	Rp -	Rp 81.645.200	Rp 219.045.980	Rp 137.390.780	37%
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Rp -	Rp 44.875.900	Rp -	Rp -	Rp 44.875.900	Rp 177.722.100	Rp 132.846.200	25%
02:01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 17.875.900,00	Rp -	Rp -	Rp 17.875.900	Rp 83.461.400	Rp 65.585.500	21%
02:02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	Rp -	Rp 27.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 27.000.000	Rp 94.260.700	Rp 67.260.700	29%
JUMLAH						Rp 127.821.100,00	Rp 405.252.080	Rp 277.430.980	32%



Rantau, 30 Juni 2022

Kabid Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja

Sitti Alayah, S.Sos, MM
 NIP. 196601061986032015

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Triwulan
Tahun Anggaran

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Sekretariat
2 (dua)
2022

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Realisasi (%)	Ket.
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Tersedianya Peralatan dan Peralengkapan kantor	Waktu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Waktu Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
4	Terakselerasinya Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
5	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Budi)	-	42 unit	-	-	-	0	-	-	0%	Masih Dalam Proses Penyerahan Barang
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
7	Tersedianya Upah Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Tersedianya Upah Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
8	Tersedianya Pajak kendaraan dinas jabatan	Waktu Penyediaan Pajak kendaraan dinas jabatan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
9	Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Waktu Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	0	0	100%	
10	Terakselerasinya Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (kali)	-	5 Kali	-	-	-	0	-	-	0%	Masih Dalam Proses Rehab

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp -	Rp 211.651.343,00	Rp -	Rp -	Rp 211.651.343,00	Rp 656.567.550,00	Rp 484.916.207,00	38%
01:01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp 21.834.800,00	Rp -	Rp -	Rp 21.834.800,00	Rp 169.337.550,00	Rp 146.502.750,00	13%
01:02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp 16.327.500,00	Rp -	Rp -	Rp 16.327.500,00	Rp 121.092.000,00	Rp 104.764.500,00	13%
01:03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.700.000,00	Rp 13.700.000,00	0%
01:04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 173.489.043,00	Rp -	Rp -	Rp 173.489.043,00	Rp 393.438.000,00	Rp 219.948.957,00	44%
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp -	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp 170.549.500,00	Rp 130.203.503,00	24%
02:01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp -	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp 170.549.500,00	Rp 130.203.503,00	24%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp -	Rp -	Rp 40.345.997,00	Rp 131.881.440,00	Rp 91.535.443,00	31%
03:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp -	Rp 28.345.997,00	Rp -	Rp -	Rp 28.345.997,00	Rp 80.796.400,00	Rp 52.452.403,00	30%
03:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000,00	Rp 51.085.040,00	Rp 39.083.040,00	23%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp -	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp 312.867.200,00	Rp 302.169.933,00	3%
04:01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp -	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp 62.520.000,00	Rp 52.002.733,00	17%
04:02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	0%
04:03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 227.867.200,00	Rp 227.667.200,00	0%
JUMLAH						Rp 392.860.604,00	Rp 1.211.685.690,00	Rp 1.066.825.086,00	23%



 Kepala Dinas

 HJ. FAUZIAH, S.Sos, M.AP

 NIP. 19660107198703 2 008

Bantul, 30 Juni 2022

 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



 MAHRIKA S.Pd

 NIP. 19820511 200501 2 016

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPT BLK Kabupaten Tapin
 Triwulan : 2 (dua)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	-	-	96 Orang	-	-	-	0	-	0%	

No.	Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Rp0	Rp17.545.000	Rp0	Rp0	Rp17.545.000	Rp 268.892.604,00	Rp 251.347.604,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	Rp17.545.000	Rp	Rp	Rp17.545.000	Rp 268.892.604,00	Rp 251.347.604,00
JUMLAH						Rp17.545.000	Rp268.892.604	Rp 251.347.604,00


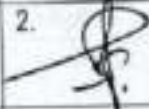


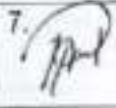
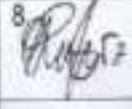
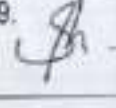
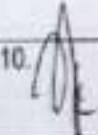


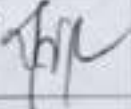

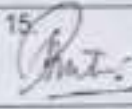

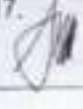

 Kepala Dinas
Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP
 NIP. 19660107 198703 2 008

Rantau, 30 Juni 2022
 Kepala UPTD BLK,

Hj. Rusmaini Indrayani, S.Sos
 NIP. 19650331 198502 2 001

**DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Aula Sekretariat Disnaker Kabupaten Tapin

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Hj. Fauziah, S.Sos, MAP NIP. 19680107 198703 2 008	Kepala Dinas	1. 	
2	Hj. Susiana Eiyati S. Sos, MM NIP. 19720217 199312 2 001	Sekretaris		2. 
3	Riza Fahliwi, S.IP, MM NIP. 19711129 199203 1 006	Kabid Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	3.	
4	Hj. Rusmaini Indrayani, S. Sos NIP. 19650331 198502 2 001	Kepala UPTD BLK Tapin		4. 
5	Rahmad Hidayat, S. Sos NIP. 19740613 199403 1 003	Pengantar Kerja	5.	
6	Nordiansyah, S. Hut NIP. 19720103 200701 1 003	Mediator		6. 
7	Pariyanto, SE NIP. 19791223 201001 1 018	Mediator	7. 	
8	Noorhayani, ST, MM NIP. 19740110 200604 2 015	Pengantar Kerja		8. 
9	Ahmad Yazidi, SE NIP. 19610903 201001 1 019	Pengantar Kerja	9. 	
10	Mahrta, S.Pd NIP. 19820311 200501 2 016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		10. 
11	Henni, SE NIP. 19830330 201001 2 013	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	11. 	
12	Asnawati, S. Sos NIP. 19660824 201001 2 020	Kasubbag TU UPTD BLK Tapin		12. 
13	Arizka Sofiyana Maharani, SE NIP. 19950224 202012 2 007	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	13. 	
14	Endah Purnama Sari, S.Ak NIP. 19960826 202012 2 007	Bendahara Pengeluaran		14. 
15	Hj. Dodoh Resmiali NIP. 19650730 198601 2 007	Instruktur	15. 	
16	Hj. Puji Astuti, S.Sos NIP. 19650822 198701 2 001	Instruktur		16. 
17	Yehosapat Paulus Haryono Timiseia, ST NIP. 19851014 201903 1 003	Instruktur	17. 	
18	Hasan Sajali, ST NIP. 19960712 201903 1 001	Instruktur		18.



19	M. Akbar Tanjung, S. Kom NIP. 19910113 202012 1 003	Instruktur	19.	
20	Bayu Aji, S. Kom NIP. 19920116 202012 1 002	Instruktur		20.
21	Ermayana NIP. 19721222 200604 2 004	Calon Instruktur	21.	
22	Sapjuandani S. Kom NIP. 19840509 200604 1 004	Instruktur		22.
23	Irpan Apriansyah NIP. 19810426 201402 1 003	Calon Instruktur	23.	
24	Rifa Atul Mahmudah NIP. 19930712 201402 2 002	Calon Instruktur		24.
25	Husin Habibi NIP. 19741229 200701 1 017	Staf Umpaeg	25.	
26	Muhammad Habibie, S.Kep	PTT		26.
27	Sukmana Fithra Rizana, S.IP	PTT	27.	
28	Rianty Novanila Siregar, ST	PTT		28.
29	Ade Seliadi, S.Pd	PTT	29.	
30	Thalia Silva Gunawan Putri	PTT		30.
31	Joko Prio Nusantoro	PTT	31.	
32	Adhi Priyono	PTT		32.
33	Sonia Nurul Amanda Harahap, S.TP	PTT	33.	
34	Muhammad Marwan Algiardi, SE	PTT		34.
35	Hairun Nisa S.S.T.Ars	PTT	35.	

Kepala Dinas



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP
NIP. 19660101 198703 2 008

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN REUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPAN**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapan
Sekeloa
2 (Rgs)

Unit Organisasi
Unit Kerja
Tahun Anggaran

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Realisasi (%)	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Tersedianya Perizinan dan Perizinan sektor	Waktu terdapatnya perizinan dan penyelesaian surat	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0	70%	
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Waktu Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0	75%	
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman Pengiriman	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0	75%	
4	terlaksananya pengorganisasian Rapat Komando dan Koordinasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Komando dan Koordinasi SKPD	25%	25%	20%	25%	20%	25%	25%	0	70%	
5	Tersedianya Peralatan dan Bahan Lainnya	Adanya Tersedianya Peralatan dan Bahan Lainnya (Bakul)	-	100%	-	-	-	-	-	0	0%	Seorang Bakul Model 6 gram ke Peralatan (Rp 10)
6	Tersedianya Jasa Komunikasi (Sms, Dgn, Me dan Listrik)	Waktu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sms dan Dgn Me dan Listrik	25%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	0	75%	
7	Tersedianya Lipat Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Tersedianya Lipat Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0	70%	
8	Tersedianya Pajak kendaraan dan parkir	Waktu Penyediaan Pajak kendaraan dan parkir	25%	25%	20%	25%	20%	25%	25%	0	75%	
9	Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Waktu Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0	75%	
10	Tersedianya Pemeliharaan mobil/gedung kantor dan bangunan lainnya	Adanya Pemeliharaan mobil/gedung kantor dan bangunan lainnya	-	100%	-	-	-	-	-	0	0%	Mobil Dapur Peralatan Ruang

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Adaptifitas Umum Pemerintah Daerah	Rp -	Rp 211.881.342,00	Rp 291.341.007,00	Rp -	Rp 502.998.250,00	Rp 626.567.550,00	Rp 193.568.290,00	72%
01.01	Perencanaan Peralatan dan Peningkatan Kapasitas	Rp -	Rp 21.834.600,00	Rp 99.466.500,00	Rp -	Rp 121.331.200,00	Rp 162.337.550,00	Rp 47.006.250,00	72%
01.02	Perencanaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp 16.327.600,00	Rp 48.172.000,00	Rp -	Rp 64.449.600,00	Rp 121.022.000,00	Rp 56.542.400,00	50%
01.03	Perencanaan Barang Gedutan dan Peralengkapan	Rp -	Rp -	Rp 3.401.000,00	Rp -	Rp 9.400.000,00	Rp 13.700.000,00	Rp 4.300.000,00	69%
01.04	Perencanaan Riset Koordinasi dan Kolaborasi SKPD	Rp -	Rp 172.486.342,00	Rp 134.328.307,00	Rp -	Rp 307.518.390,00	Rp 293.436.000,00	Rp 85.619.550,00	78%
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 52.688.400,00	Rp -	Rp 52.688.400,00	Rp 170.546.500,00	Rp 117.858.100,00	31%
02.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 52.688.400,00	Rp -	Rp 52.688.400,00	Rp 170.546.500,00	Rp 117.858.100,00	31%
3	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 40.345.987,00	Rp 17.168.455,00	Rp -	Rp 57.522.452,00	Rp 131.881.440,00	Rp 74.348.998,00	44%
03.01	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Daya for dan Listrik	Rp -	Rp 22.345.987,00	Rp 9.966.455,00	Rp -	Rp 32.312.452,00	Rp 80.798.400,00	Rp 42.460.548,00	47%
03.02	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan	Rp -	Rp 12.000.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp 19.200.000,00	Rp 51.083.040,00	Rp 21.882.040,00	38%
4	Penelitian Bauran Milik Daerah Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp 4.837.515,00	Rp -	Rp 15.354.782,00	Rp 312.687.200,00	Rp 287.332.418,00	9%
04.01	Penelitian Jasa Penulisan, Biaya Pemeliharaan, Pengujian	Rp -	Rp 10.517.267,00	Rp 4.237.515,00	Rp -	Rp 14.754.782,00	Rp 62.520.000,00	Rp 47.766.218,00	24%
04.02	Penelitian Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 21.999.000,00	3%
04.03	Penelitian Organisasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 227.967.200,00	Rp 227.967.200,00	0%
Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 628.776.864,00	Rp 1.211.885.890,00	Rp 682.908.808,00	48%

Rencana, 30 September 2022
Sekretaris Dinas


H. MUZAKKI S. S. M.A.P.
NIP. 19630107 19603 2 006

H. SUSIANA EYATI, S. Sns, MM
NIP. 19720217 195312 2 091

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Kabupaten Tapin
 Triwulan : 3 (tiga)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persenta se Capaian	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Teraksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	-	-	96 Orang	-	-	64 Orang	-	66%	Kegiatan sudah dilaksanakan 4 paket sisanya ada 2paket akan dilaksanakan di triwulan IV Karena adanya perubahan Anggaran	

No.	Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Rp0	Rp17.545.000	Rp87.375.900	Rp0	Rp104.920.900	Rp 268.892.604,00	Rp 163.971.704,00
JUMLAH		Rp	Rp17.545.000	Rp87.375.900	Rp	Rp104.920.900	Rp268.892.604	Rp 163.971.704,00

Rantau, 30 September 2022



H. Fadzah, S.Sos, M.AP
 NIP. 19661107 198703 2 008



H. Rusmaini Indrayani, S.Sos
 NIP. 19650331 198502 2 001

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi :
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :
Tahun Anggaran :

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Sekretariat
3 (tiga)
2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Realisasi (%)	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja	Persentase Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	43,75%	12,5%	31,25%	12,50%	43,75%	12,5%	31,25%	0	88%	
2	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0	75%	
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Persentase Meningkatnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	50%	-	50%	-	50%	-	50%	-	100%	

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Perencanaan, Penerimaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	Rp 5.065.000	Rp 6.333.600	Rp -	Rp 11.398.600	Rp 15.250.000	Rp 3.851.400	75%
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 5.065.000	Rp 6.333.600	Rp -	Rp 11.398.600	Rp 15.250.000	Rp 3.851.400	75%
2	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.188.020.021	Rp 3.188.020.021	0%
0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp 1.222.004.838	Rp 1.098.435.401	Rp -	Rp 2.310.440.239	Rp 3.104.970.021	Rp 874.529.782	73%
0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	Rp -	Rp 2.691.000	Rp -	Rp 2.691.000	Rp 3.051.000	Rp 355.000	89%
JUNILAH		Rp -	Rp -	Rp 2.691.000	Rp -	Rp 2.691.000	Rp 3.203.270.021	Rp 1.191.871.401	0%



Kepala Dinas
H. FAUZHIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19560107 96703 2 009

Rantau, 30 September 2022
Sekretaris Dinas
H. SUSILANA ELYATI, S.Sos, MM
NIP. 19720217 198512 2 001

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

- 1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
- 2. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3 (tiga)
- 2022

Unit Organisasi
Unit Kerja
Tribunal
Tahun Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Terdapatnya Sumber Daya Manusia Antar Kerja	Jumlah Tersedianya Sumber Daya Manusia Antar Kerja	-	30 Orang	-	-	-	0	-	-	0%	Kegiatan Digeser Ke Tribunal IV
2	Terdapatnya Penyediaan dan Bantuan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang Penyalutan dan bantingis jabatan bagi pencari kerja	-	50 Orang	-	-	-	40 Orang	-	-	80%	
3	Terdapatnya Belayanan dan Nyeperduan Informasi Pisekerja Online	Jumlah Orang Yang mendapatkan informasi Pisekerja Online	325 Orang	335 Orang	325 Orang	325 Orang	325 Orang	341 Orang	445 Orang	0	95%	
4	Terdapatnya Penibngkatan Penibngkatan dan Kaiterpenisi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Orang yang mendapat kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PWI)	-	-	45 Orang	-	-	45 Orang	0	-	100%	Kegiatan Digeser Ke Tribunal II
5	Terdapatnya Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Layanan Terpadu	-	30 Orang	1 Perita	-	-	30 Orang	-	-	100%	
6	Terdapatnya Lembaga Peleabur Kerja Swasta	Jumlah lembaga Peleabur Kerja Swasta yang Diburu (Lembaga)	-	-	12 Lembaga	17 Lembaga	-	-	0	0	0%	Kegiatan Digeser Ke Tribunal IV
7	Meningkatnya Persentase Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan	-	10 Orang	-	-	-	0	12 Orang	-	100%	Kegiatan Digeser Ke Tribunal II

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pelaksanaan Ambruknya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 11.946.000	Rp 28.397.000	Rp -	Rp 40.343.000	Rp 198.490.300	Rp 158.147.300	20%
01-03	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Asas Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.942.200	Rp 9.942.200	0%
01-02	Penyediaan dan Bimbingan Laboran bagi Pencari Kerja	Rp -	Rp 11.946.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.946.000	Rp 18.182.000	Rp 6.236.000	66%
01-03	Perluasan Kelempakan Kerja	Rp -	Rp -	Rp 20.397.000,00	Rp -	Rp 20.397.000	Rp 170.368.100	Rp 141.969.100	17%
2	Pengabdian Informas Pasar Kerja	Rp -	Rp 25.875.000	Rp 25.350.000	Rp -	Rp 61.225.000	Rp 120.530.900	Rp 59.305.900	53%
02-01	Pelayaan dan Penyediaan Informas Pasar Kerja Online	Rp -	Rp 25.875.000,00	Rp 25.350.000,00	Rp -	Rp 61.225.000	Rp 120.530.900	Rp 59.305.900	53%
3	Perhubungan PMAI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 7.600.000	Rp 75.103.900	Rp -	Rp 82.703.900	Rp 488.999.100	Rp 406.295.200	17%
03-01	Pembelian Perbandingan dan Kompetisi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMK)/Pekerja Migran	Rp -	Rp 5.030.000,00	Rp 72.803.900,00	Rp -	Rp 79.833.900	Rp 406.388.500	Rp 326.554.600	20%
03-02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Ciriin Pekerja Migran	Rp -	Rp 1.600.000,00	Rp 1.290.000,00	Rp -	Rp 2.890.000	Rp 82.610.600	Rp 79.720.600	3%
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
04-01	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.071.500	Rp 12.071.500	0%
JUMLAH						Rp 184.371.900	Rp 820.091.800	Rp 635.818.900	22%



M. FAUZIAH, S.P., M.A.P.
NIP. 19650101198703 2 008

Rantau, 30 September 2022
Kabid Pengawasan Kualitas, Penempatan dan
Perluasan Kelempakan Kerja

RIZA PAHLAWI, S.P., MM
NIP. 19711129 199230 1 006

✓

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek
 Triwulan : 3 (tiga)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Ket.
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Terkurangnya Pengeluaran/Pencapaian pp/PPK, PKWT, LKS (Sipart, SP-SB, CC bag) Daerah	Jumlah Dokumen yang diadisi	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	0	42%	Tidak ada Penilaian lain yang diperlukan
2	Terselenggaranya Pendidikan dan Informasi Secara Hibungun Insidental dan Jurnalis Sosial Temaga Kerja serta Penggajian Daerah	Jumlah Peremuan Sapat Keterjangkauan (Domen Penggajian)	1 Kali Peremuan	-	1 Kali Peremuan	1 Kali Peremuan	0 Peremuan	0	1 Kali Peremuan	0	33%	
3	Terkurangnya Peningkatan Pendidikan Hibungun Insidental Logok Kerja dan Penulisan Perbaikan	Jumlah Orang Yang diberi Sosialisai Persekitan Hibungun Insidental Logok Kerja dan Penulisan Persekitan	5006 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	5.046 Orang	3.364 Orang	3.354 Orang	5.756 Orang	0	52%	Banyaknya Agenda kegiatan Yang Diabaikan
4	Terdapatnya Pendidikan Persekitan Hibungun Insidental	Pendidikan Persekitan Persekitan Hibungun Insidental	2 Kasus	2	2 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	1	0	0	50%	Tidak Ada Asesm



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Gub.H.Aberani Sulaiman No.129 Telepon (0517) 31673 Fax (0517) 31673
RANTAU Kode Pos 71111

Nomor : 560/042/Sekret.I/DTK/2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Kinerja dan Keuangan
Triwulan IV T. A 2022

Rantau 24 Januari 2023

Kepada Yth :
Seluruh Pejabat Eselon III
dan Eselon IV Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten
Tapin
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun Anggaran 2022, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu seluruh pejabat eselon III dan IV dalam rangka Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan T.A 2022 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu 25 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja
Acara : Rapat Pembahasan Laporan Monev Capaian Kinerja dan
Keuangan Triwulan IV T.A 2022

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


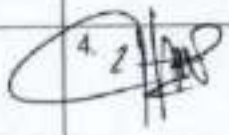
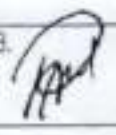


Kepala Dinas

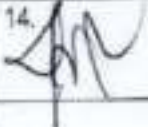


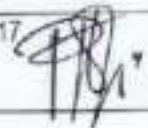

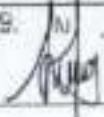

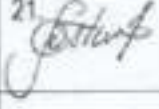
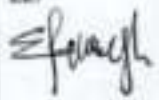










Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

**DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Aula Sekretariat Disnaker Kabupaten Tapin

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP NIP. 19660107 196703 2 008	Kepala Dinas	1. 	
2	Hj. Susiana Elyati S. Sos, MM NIP. 19720217 199312 2 001	Sekretaris		2. 
3	Rahbaini, S.Sos NIP. 19650629 199003 1 012	Kabid Hubungan Industrial	3. 	
4	Hj. Supreh heten, SE.MM NIP. 19730128 199303 2 008	Kabid Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		4. 
5	Hj. Ruameini Indrayani, S. Sos NIP. 19650331 198502 2 001	Kepala UPTD BLK Tapin	5.	
6	Rahmad Hidayat, S. Sos NIP. 19740613 199403 1 003	Pengantar Kerja		6.
7	Nordiansyah, S. Hul NIP. 19720103 200701 1 003	Mediator	7. 	
8	Pariyanto, SE NIP. 19791223 201001 1 018	Mediator		8. 
9	Noorhayani, ST, MM NIP. 19740110 200604 2 015	Pengantar Kerja	9. 	
10	Ahmad Yazidi, SE NIP. 19810903 201001 1 019	Pengantar Kerja		10.
11	Mahrita, S.Pd NIP. 19820311 200601 2 016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	11.	
12	Henni, SE NIP. 19830330 201001 2 013	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		12. 
13	Asnawati, S. Sos NIP. 19660824 201001 2 020	Kasubbag TU UPTD BLK Tapin	13. 	

14	Arizka Sofiyana Maharani, SE NIP. 19950224 202012 2 007	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		14. 
15	Endah Purnama Sari, S.Ak NIP. 19960626 202012 2 007	Bendahara Pengeluaran	15. 	
16	Hj. Dodoh Resmiati NIP. 19650730 198601 2 007	Jl. Instruktur Penyelia		16. 
17	Hj. Puji Astuti, S.Sos NIP. 19650822 198701 2 001	Jl. Instruktur Penyelia	17. 	
18	Yehosapat Paulus Haryono Timisela, ST NIP. 19851014 201903 1 003	Instruktur Ahli Pertama		18. 
19	Hasan Sajali, ST NIP. 19960712 201903 1 001	Instruktur Ahli Pertama	19. 	
20	M. Akbar Tanjung, S. Kom NIP. 19910113 202012 1 003	Instruktur Ahli Pertama		20. 
21	Bayu Aji, S. Kom NIP. 19920116 202012 1 002	Instruktur Ahli Pertama	21. 	
22	Ermayana NIP. 19721222 200604 2 004	Jl. Instruktur Pelaksana Lanjutan		22. 
23	Sapjuandani S. Kom NIP. 19840509 200604 1 004	Jl. Instruktur Pelaksana Lanjutan	23.	
24	Irfan Apriansyah NIP. 19810426 201402 1 003	Instruktur Ahli Pertama		24. 
25	Rifa Atul Mahmudah NIP. 19930712 201402 2 002	Instruktur Ahli Pertama	25. 	
26	Huain Habibi NIP. 19741229 200701 1 017	Pengadministrasi Umum		26. 
27	Sumirah, A.mc NIP. 19741009 200604 2 007	Instruktur	27. 	
28	Muhammad Habibie, S.Kep	PTT		28. 
29	Sukmana Fithra Rizana, S.IP	PTT	29. 	
30	Rianty Novanila Siregar, ST	PTT		30. 

31	Ade Seliadi, S.Pd	PTT	31	
32	Thalia Silva Gunawan Putri	PTT		32.
33	Joko Prio Nusantoro	PTT	33.	
34	Adhi Priyono	PTT		34. <i>HI</i>
35	Sonia Nurul Amanda Harehap, S.TP	PTT	35. <i>HI</i>	
36	Muhammad Marwan Algiardi, SE	PTT		36.
37	Hairun Nisa S.S.T.Ars	PTT	37. <i>HI</i>	



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP
 NIP. 19660107 198703 2 008

No.	Kategori	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. -	Rp. 211.651.343	Rp. 291.347.907	Rp. -	Rp. 504.099.250	Rp. 193.508.200	72%	
2	Keperawatan Rawat Inap Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. 52.888.400	Rp. -	Rp. 52.888.400	Rp. 117.463.100	31%	
3	Penyediaan Jasa Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. -	Rp. 48.345.957	Rp. 17.168.455	Rp. -	Rp. 67.512.412	Rp. 74.348.900	44%	
4	Perencanaan Barang Milik Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. -	Rp. 16.917.287	Rp. 4.817.515	Rp. -	Rp. 21.734.802	Rp. 297.332.413	9%	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. -	Rp. 5.065.200	Rp. 6.333.600	Rp. -	Rp. 11.398.800	Rp. 3.851.000	75%	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. -	Rp. 1.224.699.838	Rp. 1.068.435.401	Rp. -	Rp. 2.293.135.239	Rp. 814.864.782	73%	
Jumlah						Rp. 2.955.309.723	Rp. 1.361.545.088	50%	

Rantau, 30 Desember 2022

Sekretaris Dinas



HL. SUJANA ELVATI, S.Sos, MM
NIP. 19720217 199012 2 001



No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Resional Anggaran					Jumlah Realisasi	Anggaran	Dise Anggaran	Persentase
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW V				
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
1	Administratif Urusan Penunjang Daerah	Rp -	Rp 211.051.340,00	Rp 291.341.207,25	Rp 415.161.204,00	Rp 918.088.354,00	Rp 948.344.951,00	Rp 58.157.595,00	6%	
101	Penyediaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	Rp -	Rp 71.554.500,00	Rp 36.665.500,00	Rp 56.340.000,00	Rp 177.571.300,00	Rp 204.260.000,00	Rp 29.828.260,00	6%	
102	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp 60.277.000,00	Rp 48.122.100,00	Rp 42.411.000,00	Rp 148.860.000,00	Rp 148.791.000,00	Rp 8.867.000,00	6%	
103	Penyediaan Uang Casio dan Penghasilan	Rp -	Rp -	Rp 9.000.000,00	Rp 4.306.000,00	Rp -	Rp 13.306.000,00	Rp -	100%	
104	Monev/evaluasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sd.P	Rp -	Rp 174.489.043,00	Rp 134.320.367,00	Rp 790.241.304,00	Rp 603.993.654,00	Rp 613.487.000,00	Rp 11.417.348,00	39%	
2	Pencapaian Bening Muli Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 52.000.000,00	Rp 151.480.000,00	Rp 264.303.400,00	Rp 267.091.600,00	Rp 22.693.200,00	30%	
201	Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 52.000.000,00	Rp 151.480.000,00	Rp 264.303.400,00	Rp 267.091.600,00	Rp 22.693.200,00	30%	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 41.343.987,96	Rp 12.145.485,80	Rp 43.321.004,00	Rp 198.833.456,00	Rp 118.207.400,00	Rp 4.632.044,00	56%	
301	Penyediaan Jasa Kesehatan, Gencor Duga, Ji dan Laki	Rp -	Rp 20.345.007,00	Rp 9.066.455,10	Rp 25.951.104,00	Rp 84.233.456,00	Rp 68.667.400,00	Rp 4.433.144,00	64%	
302	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	Rp 13.000.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 23.400.000,00	Rp 42.600.000,00	Rp 42.600.000,00	Rp -	100%	
4	Pemeliharaan Bening Muli Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 16.517.297,00	Rp 4.937.516,00	Rp 207.270.900,00	Rp 262.631.462,00	Rp 268.048.000,00	Rp 16.408.318,00	61%	
401	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Rp -	Rp 16.517.297,00	Rp 4.237.516,00	Rp 41.222.407,00	Rp 66.477.245,00	Rp 62.026.200,00	Rp 8.942.791,00	96%	
402	Pemeliharaan Perabot dan Meubel Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 5.306.000,00	Rp 5.806.000,00	Rp 13.320.000,00	Rp 7.693.000,00	45%	
403	Pemeliharaan Perabot dan Meubel Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 220.540.433,00	Rp 220.540.433,00	Rp 220.540.433,00	Rp 2.670.357,00	99%	
Jumlah						Rp 1.912.641.002,00	Rp 1.865.793.500,00	Rp 93.892.458,00	54%	

Bandung, 28 Desember 2022
 Kepala Bidang Urusan Pemerintahan

 M. SUSANTO
 NIP. 1982011320012018

Secretaris Dinas

 M. SUSANTO
 NIP. 1982011320012018

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEMAJUAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPAN**

Unit Pengantar
Unit Kerja
Tugas
Tahap Kegiatan

Dari Tengah Kerja Kabupaten Tapan
Subsistem
4 (empat)
2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	Survei Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	7 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	5 (lima)	2 Laporan
2	Terwujudnya GSP dan Urusan ASN	Waktu Arah Perbaikan GSP dan Urusan ASN	3 Bulan	3 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
3	Terwujudnya Dokumen Laporan Keuangan Alokasi APBD dan Laporan Tahunan SMDP dan Laporan	Antara Perencanaan Dokumen Laporan Keuangan Alokasi APBD dan Laporan Tahunan SMDP dan Laporan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	Rp -	Rp 5.035.000	Rp 4.333.000	Rp 7.160.300	Rp 18.347.500	Rp 18.590.500	Rp 22.000	100%
0	Komoditas dan Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	Rp -	Rp 5.035.000	Rp 4.333.000	Rp 7.160.300	Rp 18.347.500	Rp 18.590.500	Rp 22.000	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 1.224.698.838	Rp 1.088.400.401	Rp 878.419	Rp 3.115.011.658	Rp 3.985.018.916	Rp 73.007.257	98%
0	Perencanaan GSP dan Urusan ASN	Rp -	Rp 1.222.698.838	Rp 1.086.400.401	Rp 877.595.119	Rp 3.112.020.598	Rp 3.984.068.916	Rp 72.942.647	98%
0	Komoditas dan Perencanaan Laporan Keuangan Alokasi APBD dan Laporan Tahunan SMDP	Rp -	Rp 2.098.000	Rp -	Rp 291.300	Rp 2.389.300	Rp 3.000.000	Rp 52.700	80%
JMLAH		Rp -	Rp 8.360.000	Rp 5.421.400	Rp 8.329.900	Rp 24.852.300	Rp 25.576.000	Rp 723.700	97%

Sekretaris Daerah
RI BERNANDA AYATI, S.Sos, MM
NIP. 19720217 199312 2 001

Banda, 30 September 2022
Kepala Bidang Pemasaran dan Jasa Keuangan

NIP. 19630326 01001 2 013

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Tahun
Tahun Anggaran

: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
: Bidang Pengabdian Komunitas, Peningkatan dan Perluasan Kemampuan Kerja
: 4 (empat)
: 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tercapainya				Capaian Kinerja				Persentase Capaian (%)	Nilai
			TM. I	TM. II	TM. III	TM. IV	TM. I	TM. II	TM. III	TM. IV		
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	jumlah Terselenggaranya Sertifikasi Daya Saing Masyarakat Kerja	-	30 Orang	-	-	-	0	-	30 Orang	100%	
2	Terwujudnya Perbaikan dan Sertifikasi jabatan bagi semua warga	jumlah Orang yang mengikuti sertifikasi jabatan dan sertifikasi kerja	-	50 Orang	-	-	-	0	-	50 Orang	100%	
3	Peningkatan dan Penguasaan Informasi Pemasangan Otomatis	jumlah Orang yang mengikuti pelatihan Pemasangan Otomatis	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	120 Orang	112%	
4	Terwujudnya Peningkatan dan Penguasaan Informasi Pemasangan Otomatis	jumlah Orang yang mengikuti pelatihan Pemasangan Otomatis	-	-	45 Orang	-	-	0	-	45 Orang	100%	
5	Terwujudnya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Layanan Terpadu	-	30 Orang	-	-	-	0	-	30 Orang	100%	
6	Terwujudnya Lembaga Kelembagaan Kerja Swasta	jumlah Lembaga Kelembagaan Kerja Swasta yang Terbentuk	-	-	12 Lembaga	12 Lembaga	-	-	-	12 Lembaga	100%	
7	Meningkatnya Persepsi Persepsi Masyarakat Kerja	jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan	-	10 Orang	-	-	-	0	-	10 Orang	100%	



H. Supreh Hatten, S.E., M.AP.
NIP. 1963071993032008

No.	Societas / Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
1	Pelaksanaan Anggaran di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 11.546,000	Rp 28.397,000	Rp 1.566.241,136	Rp 1.606.604,136	Rp 1.733.696,200	Rp 125.492,064	97%
1.01	Pembelian Sumber Daya Tetap Artistik Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.650,000,00	Rp 6.550,000	Rp 5.943,200	Rp 1.392,200	86%
1.02	Pengalokasian Berbagai Jenis dan Jenis Pekerjaan Kerja	Rp -	Rp 11.048.000,00	Rp -	Rp 5.246.200,00	Rp 18.140,000	Rp 18.140,000	Rp 20,000	100%
1.03	Pembelian Ketersediaan Kerja	Rp -	Rp -	Rp 28.287,000,00	Rp 1.561.696,136	Rp 1.581.696,136	Rp 1.703.977,000	Rp 122.079,864	91%
2	Pengalokasian Anggaran Pasar Kerja	Rp -	Rp 86.875,000	Rp 25.360,000	Rp 27.600,000	Rp 86.835,000	Rp 48.990,000	Rp 30.105,000	90%
2.01	Perbaikan dan Perawatan Infrastuktur Pasar Kerja	Rp -	Rp 86.875,000,00	Rp 25.360,000,00	Rp 27.600,000,00	Rp 86.835,000	Rp 48.990,000	Rp 30.105,000	90%
3	Perencanaan PMI (Pw dan Pwca Pemerintahan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 7.500,000	Rp 79.100,000	Rp 277.082,200	Rp 359.786,200	Rp 390.790,000	Rp 30.944,800	97%
3.01	Perencanaan Perencanaan dan Kompetensi Calon Pemimpin Wilayah Indonesia (PMU/Pemula Wilayah)	Rp -	Rp 6.000,000,00	Rp 73.620,000,00	Rp 289.340,500,00	Rp 349,071,400	Rp 395.393,000	Rp 14.208,600	96%
3.02	Perencanaan Kegiatan Terpadu pada Calon Pemula	Rp -	Rp 1.500,000,00	Rp 1.200,000,00	Rp 7.818,800,00	Rp 10.693,800	Rp 25.449,800	Rp 14.756,000	42%
4	Pembinaan Keluarga Pelalihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.215,000	Rp 11.215,000	Rp 12.071,500	Rp 856,500	93%
4.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.215,000,00	Rp 11.215,000	Rp 12.071,500	Rp 856,500	93%
		KUMILAH				Rp 2.085.610,316	Rp 2.233.839,200	Rp 147.418,064	93%

Pantau, 30 Desember 2022

Kadai Perencanaan Kuatitas, Perencanaan dan
Pembinaan Pelalihan Kerja

H. SUPREH HATTEN, S.E., M.M
NIP. 19720128 196303 2 008

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Hubungan Industrial, Gwarant-Gwarant Kerja dan Jaminan
 Tindakan : 4 (empat)
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Gambar Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Pencapaian & Capaian (%)	Ked
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/Perwakilan sebagai PKWT/LKJ (Bupati, Bupati, OC, Peng	Jumlah Dokumen yang dibuat	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	62%	Tidak ada Pengukuran yang dilakukan
2	2. Pelaksanaan Peningkatan dan Informasi Gaseas, Layanan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengabdian	Jumlah PPT Honorar di Kecamatan Tapin yang Lulus MCL (Jumlah Kesepakatan Kerja dan KKM (Jumlah dan Mendiri	1 KSA Perbulan	-	1 KSA Perbulan	1 KSA Perbulan	0 Perbulan	0 Perbulan	1 KSA Perbulan	2 KSA Perbulan	100%	
3	3. Pelaksanaan Peningkatan dan Informasi Gaseas, Layanan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengabdian	Jumlah Orang Yang diikut sertakan kegiatan pelatihan/ seminar/ kegiatan lainnya dan Pengabdian Masyarakat	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	3.300 Orang	3.300 Orang	5.350 Orang	6.120 Orang	92%	
4	4. Pelaksanaan Peningkatan dan Informasi Gaseas, Layanan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengabdian	Jumlah Penyediaan dan Informasi Gaseas, Layanan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengabdian	2 KSA	2 KSA	2 KSA	4 KSA	2 KSA	1 KSA	0	2 KSA	50%	Harap bisa ada

Sampai ke
Kegiatan Yang
Dilakukan

**MONITORING EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Triwulan
Tahun Anggaran

: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
: UPT BLK Kabupaten Tapin
: 4 (empat)
: 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Persentase Capaian	Ket
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1	Teraksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kistar Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	-	-	96 Orang	-	-	64 Orang	32 Orang	100%		

No.	Kegiatan	Realisasi Anggaran				Jumlah Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Rp0	Rp17.545.000	Rp87.375.900	Rp127.588.050	Rp232.508.950	Rp 252.842.600.00	Rp 20.333.650.00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	Rp17.545.000	Rp87.375.900	Rp127.588.050	Rp232.508.950	Rp 252.842.600.00	Rp 20.333.650.00
	JUMLAH					Rp232.508.950	Rp252.842.600	Rp 20.333.650.00

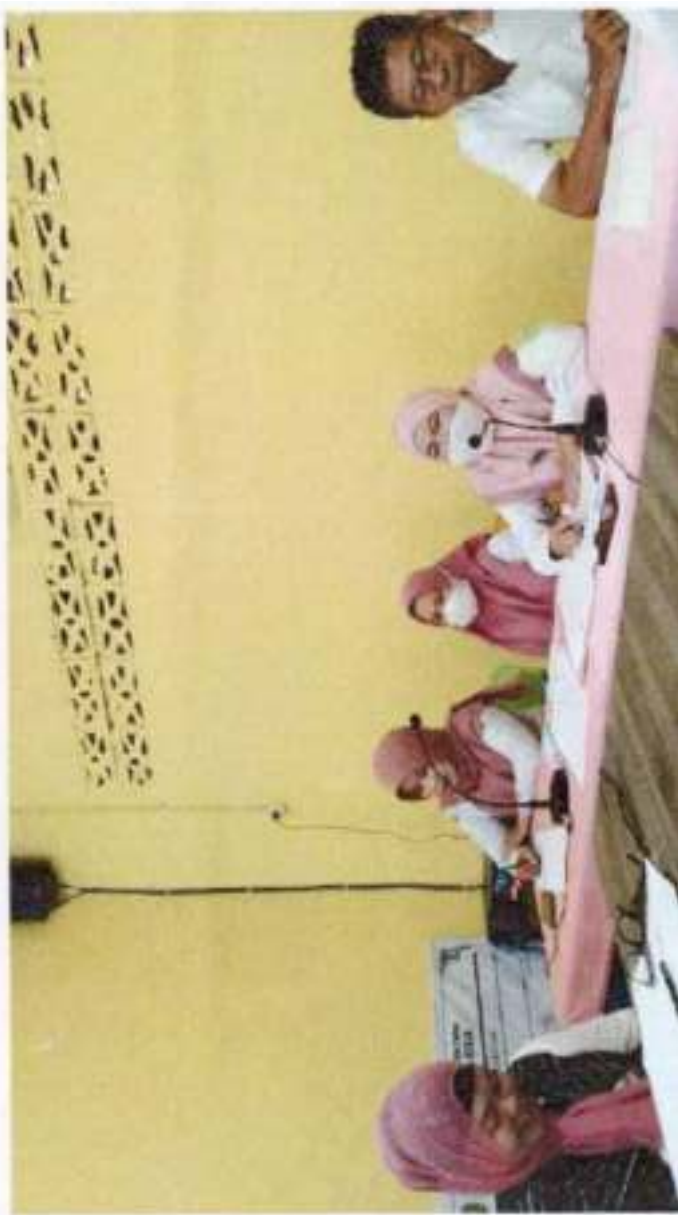


Rantau, 30 Desember 2022

Kepala UPTD BLK,

H. Rusmaini Indrayani, S.Sos
NIP. 19650331198502 2 001

H. Fauziah, S.Sos, M.AP
NIP. 19680107198703 2 008



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Puji Astuti
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP				50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel				50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul				50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket				50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP				34,7%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan					0,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah				50,0%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 31 Maret 2022

Yang Bersangkutan,

HJ. PUJI ASTUTI

NIP. 19650822 198701 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Puji Astuti
Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-			50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-			50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-			50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-			50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP			57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan			50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-			50,0%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja



Hj. E. (S) M. S. S. M. AP
NIP. 19650107 198703 2 008

Rantau, 30 Juni 2022
Yang Bersangkutan,



HJ. PUJI ASTUTI
NIP. 19650822 198701 2 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Puji Astuti
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-		50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-	-		50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-		50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-		50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-		50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP	-		57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-		50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-		50,0%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Hj. Puji Astuti, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

Rantau, 30 September 2022

Yang Bersangkutan,

HJ. PUJI ASTUTI

NIP. 19650822 198701 2 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Puji Astuti
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-	1 GBPP	100,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-	-	1 Satpel	100,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-	1 Set Jobsheet	100,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-	1 Modul	100,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	100,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP	-	160 JP	100,0%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	100,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-	1 Naskah	100,0%	

Mengetahui



Rantau, 31 Desember 2022
Yang Bersangkutan,

Hj. PUJI ASTUTI
NIP. 19650822 198701 2 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Hj. Dodoh Resmiati
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP				50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel				50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul				50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket				50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	360 JP	132 JP				34,7%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan					0,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah				50,0%	



Rantau, 31 Maret 2022
Yang Bertandatangan,

HJ. DODOH RESMIATI
NIP. 196507301986032007

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Dodeh Resmiati
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-			50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-			50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-			50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-			50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	360 JP	132 JP	88 JP			57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan			50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-			50,0%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 30 Juni 2022

Yang Bersangkutan,

Hj. DODOH RESMIATI

NIP. 196507301986032007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Hj. Dodoh Resmiati
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-		50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-	-		50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-		50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-		50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-		50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP	-		57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-		50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-		50,0%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 30 September 2022
Yang Berhormat,

HJ. DODOH RESMIATI
NIP. 19650730 198603 2 007

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Hj. Dodoh Resmiati
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-	1 GBPP	100,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-	-	1 Satpel	100,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-	1 Set Jobsheet	100,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-	1 Modul	100,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	100,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP	-	160 JP	100,0%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	100,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-	1 Naskah	100,0%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 31 Desember 2022
Yang bersangkutan,

H. DODOH RESMIATI
NIP. 19650730 198603 2 007

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Rifa Atul Mahmudah, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP				33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel				33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul				33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket				33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132				24,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0 Laporan				0,0%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah				33,3%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja
RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom, MAP
NIP. 19601281987032008



Rantau, 31 Maret 2022

Yang Berangkat,

RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom

NIP. 19607122014022002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Rifa Atul Mahmudah, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-			33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Sapek	1 Sapek	-			33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-			33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-			33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP			39,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan			33,3%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-			33,3%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin

Hj. FATMAH, S.Sos, M.AP
NIP. 1964042198703 2 008



Rantau, 30 Juni 2022

Yang Bersangkutan,

RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom

NIP. 19930712 201402 2 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Rifa Atul Mahmudah, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP		66,7%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel		66,7%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet		66,7%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul		66,7%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket		66,7%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110 JP		60,3%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan		66,7%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah		66,7%	

Mengetahui

Dinas Tenaga Kerja

RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom, MLAP
 NIP. 19930712 201402 2 008



Rantau, 30 September 2022

Yang Bersangkutan,

RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom

NIP. 19930712 201402 2 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Rifa Atul Mahmudah, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP	1 GBPP	100%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel	1 Satpel	100%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	100%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul	1 Modul	100%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110	212	100%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan		2 Laporan	100%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah	1 Naskah	100%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin
H. FAIZAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19640214987032008



Rintau, 31 Desember 2022

Yang Berangkutan,

RIFA ATUL MAHMUDAH, S.Kom
NIP. 198307122014022002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Irpan Apriansyah, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP				33,3%	
2	Membantu menyusun bahan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel				33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul				33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket				33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132				24,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0 Laporan				0,0%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah				33,3%	

Mengetahui
 Kepala Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Tapin



Rantau, 31 Maret 2022
 Yang Bertanggungjawab,


IRPAN APRIANSYAH, S.Kom
 NIP. 198304262014021003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Irpan Apriansyah, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-			33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-			33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-			33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-			33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP			39,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan			33,3%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-			33,3%	

Mengetahui

Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Tapin

Irpan Apriansyah, S.Sos, M.AP

NIP. 1980426 201402 1 003

NIP. 1980426 201402 1 003

Rantau, 30 Juni 2022

Yang Bersangkutan,



IRPAN APRIANSYAH, S.Kom

NIP. 1980426 201402 1 003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Irfan Apriansyah, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Kerangka Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP		66,7%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel		66,7%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet		66,7%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul		66,7%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket		66,7%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	634 JP	132 JP	89 JP	110 JP		60,3%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan		66,7%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah		66,7%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja

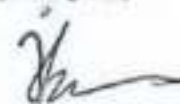
(Stempel)

Irfan Apriansyah, S.Kom, M.AP

NIP. 196604271987032008

Rantau, 30 September 2022

Yang Bersangkutan,



IRFAN APRIANSYAH, S.Kom

NIP. 198104262014021003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Irpan Apriansyah, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP	1 GBPP	100%	
2	Membantu menyusun semua pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel	1 Satpel	100%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	100%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul	1 Modul	100%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	634 JP	132 JP	80 JP	110	212	100%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan		2 Laporan	100%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah	1 Naskah	100%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Tapin
Irpan Apriansyah, S.Kom, M.Pd
 NIP. 196011011987002003



Rantau, 31 Desember 2022

Yang Berangkutan,

IRPAN APRIANSYAH, S.Kom
 NIP. 198104252014021003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP				33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel				33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul				33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket				33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132				24,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan					0,0%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah				33,3%	

Mengetahui
 Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 31 Maret 2022
 Yang Bersangkutan,

(Signature)
 M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 NIP. 197701132020121003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-			33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-			33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-			33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-			33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP			29,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan		1 Laporan			33,3%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-			33,3%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 30 Juni 2022

Yang Berusaha,

M. AKBAR TANJUNG, S.Kom

NIP. 199401132020121003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP		66,7%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel		66,7%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet		66,7%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul		66,7%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket		66,7%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110 JP		60,3%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		66,7%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah		66,7%	

Mengetahui
 Kepala Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Tapin

 M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 NIP. 196601071987032008

Rantau, 30 September 2022
 Yang bersangkutan,


 M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
 NIP. 199001132020121003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP	1 GBPP	100%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel	1 Satpel	100%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	100%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul	1 Modul	100%	
5	Membantu membuat modul alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110	212	100%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan		1 Laporan	-	2 Laporan	100%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah	1 Naskah	100%	

Mengstahi



Rantau, 31 Desember 2022
Yang Bersangkutan,

(Signature)
M. AKBAR TANJUNG, S.Kom
NIP. 199101132020121003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Sapjandani, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP				33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel				33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul				33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket				33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132				24,7%	
7	Membantu mengevshani kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0 Laporan				0,0%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah				33,3%	



Rantau, 31 Maret 2022
 Yang Bersangkutan,

(Signature)
SAPJANDANI, S.Kom
 NIP. 19840509 200604 1 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Sapjandani, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GEPP	1 GEPP	-			33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Sapel	1 Sapel	-			33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-			33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-			33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP			39,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan			33,3%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-			33,3%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin

Hj. FAUZAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19640411198703 2 008



Rantau, 30 Juni 2022

Yang bersangkutan,

SAPJANDANI, S.Kom
NIP. 19840509 200604 1 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Sapjaandani, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP		66,7%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel		66,7%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet		66,7%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul		66,7%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket		66,7%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110 JP		60,3%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan		66,7%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah		66,7%	

Mengetahui



Rantau, 30 September 2022

Yang bersangkutan,


SAPJAUANDANI, S.Kom
NIP. 19840509 200604 1 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Sapijandani, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP	1 GBPP	100%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel	1 Satpel	100%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	100%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul	1 Modul	100%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	634 JP	132 JP	80 JP	110	212	100%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan	0	1 Laporan		2 Laporan	100%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah	1 Naskah	100%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin
Sapijandani, S.Kom, MAP
NIP. 196601071987032008



Rantau, 31 Desember 2022
Yang bersangkutan,


SAPIJANDANI, S.Kom
NIP. 196601072006041004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Bayu Aji, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-			33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahan pelatihan dalam satu paket dengan kewangannya	3 Satpel	1 Satpel	-			33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewangannya	3 Sat Jobsheet	1 Sat Jobsheet	-			33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-			33,3%	
5	Membantu membuat modul alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-			33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP			39,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewangannya	3 Laporan		1 Laporan			33,3%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-			33,3%	



Rantau, 30 Juni 2022

Yang Berangkutan,

BAYU AJI, S.Kom

NIP. 19920116 202012 1 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Bayu Aji, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPALAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelunihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP				33,3%	
2	Membantu menyusun satuan pokok belahan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel				33,3%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				33,3%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul				33,3%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket				33,3%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP				24,7%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan					0,0%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah				33,3%	

Mengetahui



Rantau, 31 Maret 2022

Yang Bersangkutan,

BAYU AJI, S.Kom

NIP. 196201162020121002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atan Nama : Bayu Aji, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP		66,7%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel		66,7%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet		66,7%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul		66,7%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket		66,7%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	334 JP	132 JP	80 JP	110 JP		60,3%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		66,7%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah		66,7%	

Mengotahui



Rantau, 30 September 2022

Yang Bersangkutan,

BAYU AJI, S.Kom

NIP. 19920116 202012 1 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Bayu Aji, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	Membantu menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	3 GBPP	1 GBPP	-	1 GBPP	1 GBPP	100%	
2	Membantu menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	3 Satpel	1 Satpel	-	1 Satpel	1 Satpel	100%	
3	Membantu membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	1 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	100%	
4	Membantu menyusun modul pelatihan anak tingkat dasar	3 Modul	1 Modul	-	1 Modul	1 Modul	100%	
5	Membantu membuat media alat peraga pelatihan multi media	3 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	
6	Membantu mengajar pada pelatihan tingkat dasar	534 JP	132 JP	80 JP	110	212	100%	
7	Membantu mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	3 Laporan		1 Laporan	-	2 Laporan	100%	
8	Membantu menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	3 Naskah	1 Naskah	-	1 Naskah	1 Naskah	100%	



Rantau, 31 Desember 2022

Yang Dersangkutan

BAYU AJI, S.Kom

NIP. 199201162020121002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Ermayana
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP				50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel				50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet				50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul				50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket				50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP				34,7%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan					0,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah				50,0%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 31 Maret 2022
Yang Bersangkutan,

ERMAYANA

NIP. 19721222 200604 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
 Atas Nama : Ermayana
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-			50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-			50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-			50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-			50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-			50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP			57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan			50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-			50,0%	

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja



Hj. MURTAHA, S.Sos, M.AP
NIP. 1966071987012 008

Rantau, 30 Juni 2022
Yang Bersangkutan,

ERMAYANA
NIP. 19721222 200604 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Ermayana
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-		50,0%	
2	menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangan	2 Satpel	1 Satpel	-	-		50,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-		50,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-		50,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-		50,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	360 JP	132 JP	88 JP	-		57,9%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-		50,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-		50,0%	

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Rantau, 30 September 2022

Yang Bersangkutan,

ERMAYANA

NIP. 19721222 200604 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
Unit Kerja : UPTD BLK Tapin
Atas Nama : Ermayana
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				CAPAIAN	KETERANGAN
			TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	menyusun Rencana Pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	2 GBPP	1 GBPP	-	-	1 GBPP	100,0%	
2	menyusun satum pokok bahasan pelatihan dalam satu paket dengan kewenangannya	2 Satpel	1 Satpel	-	-	1 Satpel	100,0%	
3	membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Set Jobsheet	1 Set Jobsheet	-	-	1 Set Jobsheet	100,0%	
4	menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar	2 Modul	1 Modul	-	-	1 Modul	100,0%	
5	membuat media alat peraga pelatihan multi media	2 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	100,0%	
6	mengajar pada pelatihan tingkat dasar	380 JP	132 JP	88 JP	-	160 JP	100,0%	
7	mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	2 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	100,0%	
8	menyusun Program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja	2 Naskah	1 Naskah	-	-	1 Naskah	100,0%	



Rantau, 31 Desember 2022
Yang bersangkutan,

ERMAYANA
NIP. 19721222 200604 2 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 Atas Nama : Ariika Sofiyana Maharani, S.E.
 Tahun Anggaran : 2022

No	Uraian Kerja	Target	Realisasi				Capaian	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Menyiapkan bahan dan merancang formula penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin	5 Dokumen	1	2	1	1	100%	
2	Menghimpun usaha program dan kegiatan dari semua unsur bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin	18 Dokumen	6	6	3	3	100%	
3	Menyiapkan bahan dan menyusun draft konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Draft konsep Rencana Kerja (RE-NIA), Draft konsep Kebijakan Utama Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUP/PPAS), Draft konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Draft konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), dan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kab. Tapin	6 Dokumen	2	2	2	-	100%	
4	Menyusun informasi dan mengenai rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin	4 Dokumen	-	2	-	2	100%	
5	Melaksanakan telaah dan analisis dokumen Laporan pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin serta data pendukung lainnya	18 Dokumen	6	6	3	3	100%	
6	Menyusun konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas, konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin dan konsep Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tapin. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin	4 Dokumen	4	-	-	-	100%	
7	Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	18 Dokumen	6	6	3	3	100%	
8	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	18 Dokumen	6	6	3	3	100%	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas dan tanggung jawab serta kelancaran pelaksanaan tugas	12 Dokumen	2	2	4	4	100%	



Barrus 05 Januari 2022,
 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

 Ariika Sofiyana Maharani, S.E.
 NIP. 199502242020122607

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
 Unit Kerja : Sekretariat
 Jabatan : Penata Keuangan
 Atas Nama : Endah Purnama Sari
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi				Capaian	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Menyusun Dokumen terkait Anggaran	2 Dokumen	1	-	1	-	100%	
2	Memeriksa dan Menginput Bukti Pengeluaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	1050 Berkas	54	243	300	453	100%	
3	Menyusun Dokumen terkait Keuangan	3 Dokumen	1	1	1	-	100%	
4	Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)	90 Surat	9	18	20	43	100,0%	

Rantau, 03 Januari 2023

Penata Keuangan



Endah Purnama Sari, S.Ak.
NIP. 199606262020122007

